

BAB II

ACTIONAID SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL NON- NEGARA BERBASIS KEMANUSIAAN

Keberadaan NGO dalam hubungan internasional dewasa ini memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi isu-isu dunia. Peran tersebut bervariasi sejalan dengan tujuan awal mula organisasi tersebut dibentuk. Maka dari itu, penting untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dari ActionAid sebagai sebuah NGO. ActionAid memiliki cara sendiri dalam mengatasi suatu isu yaitu melalui nilai-nilai kemanusiaan dimana hal tersebut sesuai dengan asumsi konstruktivisme bahwa konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional adalah sebuah proses pembelajaran, interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas, kepentingan, nilai-nilai dan maksud yang membentuk pola hubungan tertentu. Bab ini akan membahas profil aktor yang menjadi fokus penelitian mencakup latar belakang organisasi, tujuan, nilai-nilai, visi dan misi, struktur organisasi, alokasi pendanaan, strategi organisasi terkait dalam pengurangan kemiskinan, kehadiran ActionAid di India dan mitra yang bekerjasama.

2.1 Latar Belakang ActionAid

ActionAid didirikan pada tahun 1972 oleh pengusaha Inggris dan kemanusiaan, Cecil Jackson-Cole sebagai badan amal yang membantu dalam bidang pendidikan dan

kesejahteraan anak-anak di negara berkembang.⁵² Sejak awal, model penggalangan dana utama ActionAid berpusat pada sponsor anak dimana para donatur menyumbangkan uang secara berkala untuk mendukung pendidikan dasar dan kesejahteraan anak tertentu serta penyediaan untuk komunitas pendidikan. Berbasis di London, ActionAid memulai program tingkat negara di beberapa negara berkembang. Pada tahun 1980-1990-an, ActionAid mendirikan *Aide et Action* di Perancis, *Ayuda en Acción* di Spanyol, ActionAid Ireland, *Azione Aiuto* di Itali, ActionAid Hellas di Yunani dan ActionAid USA sebagai *the sisters organizations* sehingga memperluas kehadiran ActionAid di negara-negara berpenghasilan tinggi.⁵³ *The sister organizations* tersebut mengumpulkan dana dan menyalurkannya ke program ActionAid di Afrika dan Asia yang mencapai lebih dari 40,000 anak pada tahun 1984 melalui ActionAid London yang mengawasi semua program negara.⁵⁴ Aliansi ActionAid dibentuk untuk mendorong koordinasi terhadap penggalangan dana dan advokasi antara *the sister organizations*. Namun, kebijakan tersebut dinonaktifkan pada tahun 2003 untuk memberi jalan terhadap program internasionalisasi.

⁵² Sherine Jayawickrama dan Alnoor Ebrahim, "Building and Governing a Democratic Federation: The ActionAid International Story", *The Hauser Center for Nonprofit Organizations*, (Juni 2013), hlm. 1 https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/building_and_governing_a_democratic_federation_FINAL_00076ade-e2a2-46da-b30f-5c94445ec793.pdf

⁵³ *Ibid*, Sherine Jayawickrama dan Alnoor Ebrahim, "Building and Governing a Democratic Federation: The ActionAid International Story".

⁵⁴ Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", *Harvard Business School*, (10 Juli 2013), hlm 2. file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

Pekerjaan yang dilakukan ActionAid melalui pendekatannya (*development approach*) berkembang dimana perubahan tersebut secara kritis telah mempengaruhi wacana dan tindakan organisasi dalam hal tata kelola dan struktur organisasi. Pada tahun 1970-an, pekerjaan ActionAid berfokus untuk mengarahkan uang dari donatur untuk pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang disponsori. Kebijakan tersebut kemudian diperluas pada tahun 1980-an untuk misi yang lebih luas dari pengembangan masyarakat meliputi peningkatan pendapatan, kesehatan dasar dan pengembangan agrikultural. Redefinisi yang mendalam datang pada tahun 1990-an dengan pengakuan bahwa kemiskinan dapat dan harus diberantas, tidak hanya diperbaiki, dan akar penyebab kemiskinan harus diatasi.⁵⁵ Redefinisi tersebut kemudian mengatur tahapan untuk artikulasi pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan yang memerlukan pengembangan kapasitas baru untuk advokasi di tingkat nasional dan global. ActionAid menggabungkan pendekatan partisipatif dengan desentralisasi wewenang dalam organisasi. Dalam pengertian formal, ActionAid merupakan organisasi yang berbasis dan dikendalikan oleh bagian utara, namun staf di selatan dimana program kerja beroperasi, memiliki semangat untuk melawan ketidakadilan, mencari perwakilan kaum miskin dalam pengambilan

⁵⁵ Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", *Harvard Business School*, (10 Juli 2013), hlm 2.
file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

keputusan, dan menantang ketidakseimbangan kekuatan secara internal dan eksternal.⁵⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, Sali Shetty, warga negara India yang pernah menjabat sebagai Direktur Negara dari ActionAid India dan ActionAid Kenya, diangkat sebagai kepala Eksekutif ActionAid pada 1998. Penunjukan ini dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan keberagaman dalam Dewan Pengawasan ActionAid dimana sampai saat itu hanya terdiri dari warga negara Inggris. Shetty merupakan salah satu dari kelompok ActionAid senior yang berpendapat bahwa NGO seperti ActionAid tidak akan pernah bisa mempengaruhi kemiskinan global dan ketidakadilan sosial apabila hanya bergantung dengan sumber penggalangan dana. Sumber daya keuangan tersebut dianggap hanya bagian kecil dari bantuan asing dan amal, dimana hal tersebut berperan sebagai pendorong dari adanya penurunan pembangunan. Hal penting yang dapat membantu untuk pengaruh adalah kekuatan moral dan intelektual dimana kemampuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap kaum miskin dan terkucilkan dan melibatkan perspektif serta pengetahuan mereka dalam pekerjaan organisasi. Peningkatan legitimasi merupakan upaya organisasi untuk memiliki akuntabilitas terhadap kaum miskin dan agar ActionAid dapat membantu meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kewajiban mereka terhadap warga negara.

⁵⁶ Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", *Harvard Business School*, (10 Juli 2013), hlm 3.
file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

Keberadaan ActionAid dapat menjadi pengakuan bahwa peran aktor lain diperlukan dalam menangani isu-isu global dan memiliki dampak yang lebih besar dalam perjuangan –pada kasus ini, pengurangan kemiskinan– dengan bertindak secara koalisi dan bekerjasama dengan kemitraan baik ditingkat lokal, nasional, dan global. Cara kerja ActionAid juga membuktikan bahwa kekuatan berada pada masyarakat dimana salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan terletak pada gerakan sosial global yang dipimpin oleh orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan terkucilkan.

2.2 Tujuan, Nilai, Visi, dan Misi ActionAid

Model tata kelola yang dianut oleh ActionAid telah mengalami peninjauan beberapa kali untuk menilai dampak dari internasionalisasi dan mengidentifikasi bagaimana memperkuat pengaturan tata kelola. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan tata global yang dilakukan ActionAid sebagian besar dianggap berhasil dan layak untuk diupayakan lebih lanjut dalam menjangkar nilai-nilai dan prinsip-prinsip ActionAid dalam strukturnya.⁵⁷ Konstitusi ActionAid kemudian menyatakan bahwa tujuan didirikannya ActionAid pada tahun 2003 dan konversinya menjadi Asosiasi pada tahun 2009 adalah untuk:⁵⁸

- a. Meningkatkan kinerja dan pengaruh ActionAid dalam melawan kemiskinan dan ketidakadilan;

⁵⁷ ActionAid, “Good Practices for ActionAid Governance: The Governance Manual”, (01 Desember 2014). <https://ActionAid.org/publications/2014/good-practices-ActionAid-governance-governance-manual>

⁵⁸ *Ibid*, ActionAid, “Good Practices for ActionAid Governance: The Governance Manual”.

- b. Memperdalam legitimasi dan akuntabilitas ActionAid kepada orang-orang, komunitas dan negara-negara dimana ActionAid bekerja baik di selatan maupun utara;
- c. Memperkuat profil, suara, dan pengaruh ActionAid untuk membawa perubahan dalam sikap, kebijakan, dan praktik demi orang yang hidup dalam kemiskinan dan orang yang dikucilkan;
- d. Mendapatkan lebih banyak dana dan dukungan untuk program kerja ActionAid dari donor, masyarakat, kelompok dan komunitas yang teridentifikasi serta pemerintah dan organisasi swasta;
- e. Mengembangkan dan memperkuat Anggota Afiliasi dan Asosiasi ActionAid serta mitra, koalisi, aliansi dan jaringan untuk hubungan solidaritas yang efektif dan tindakan kolektif;
- f. Memperkuat identitas, koherensi, dan persatuan ActionAid seraya menghormati keberagaman melalui nilai-nilai, visi, misi, strategi, standar, dan sistem bersama; serta
- g. Mengembangkan dan memaksimalkan pemanfaatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas sumber daya manusia internal dan hubungan ActionAid di berbagai bagian organisasi untuk meningkatkan sinergi dan mengurangi duplikasi yang sia-sia.

Secara keseluruhan, tujuan utama ActionAid adalah untuk mencapai sebuah tatanan sosial yang adil untuk orang-orang yang dirampas atas pengklaiman hak

mereka untuk menjadi bermartabat dan beridentitas melalui peningkatan partisipasi demokratis dan transformasi struktural.

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka visi yang dimiliki oleh ActionAid adalah untuk menciptakan dunia tanpa kemiskinan dan ketidakadilan dimana setiap orang dapat menikmati hak mereka untuk hidup bermartabat.⁵⁹ Untuk mencapai visi tersebut, ActionAid memiliki misi untuk bekerja dan terlibat secara langsung dengan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan dikucilkan untuk memberantas kemiskinan dan ketidakadilan.⁶⁰ Terlebih lagi, ActionAid juga akan bekerja dengan komunitas dan organisasi masyarakat serta gerakan sosial dan dukungan akan *Power in People*. Ketidaksetaraan juga menjadi perhatian ActionAid sehingga perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan terkucilkan merupakan sasaran utama dari arena kerja ActionAid. Hal tersebut dikarenakan tujuan ActionAid untuk lebih adil dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya, memastikan bahwa perempuan juga mendapatkan dan menikmati hak asasi manusia mereka.⁶¹ Visi dan misi tersebut berdasarkan hasil kerja pada tahun 2004 akan strategi internasional baru yang dijelaskan pada Konstitusi 2009.⁶²

⁵⁹ ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028 (In Summary)", hlm. 1. https://actionaid.org/sites/default/files/strategy_2028_summary.pdf

⁶⁰ *Ibid*, ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028 (In Summary)", hlm. 9

⁶¹ *Ibid*, ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028 (In Summary)" hlm. 9.

⁶² ActionAid, "Good Practices for ActionAid Governance: The Governance Manual", (01 Desember 2014). <https://ActionAid.org/publications/2014/good-practices-ActionAid-governance-governance-manual>

Untuk menjalankan misinya, ActionAid beroperasi dengan upaya memperdalam komitmen untuk mengubah budaya organisasi dengan mengikuti pilar nilai-nilai inti berikut:⁶³

- a. *Mutual Respect* – mengharuskan ActionAid untuk mengakui nilai bawaan yang dimiliki oleh semua orang dan nilai dari keberagaman;
- b. *Equity, Justice and Diversity* – mengharuskan ActionAid bekerja untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua orang, terlepas dari ras, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, status penyakit HIV, warna kulit, kelas, etnis, cacat, lokasi atau agama;
- c. *Honesty and Transparency* – bertanggungjawab pada semua tingkatan untuk keefektivitasan tindakan dan terbuka dalam penilaian dan komunikasi dengan orang lain;
- d. *Solidarity with people living in poverty and powerless and excluded people* – menjadi satu-satunya bias dalam komitmen ActionAid untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan;
- e. *Courage of Conviction* – menuntut ActionAid untuk menjadi kreatif dan progresif, berani dan inovatif, tidak memiliki rasa takut akan kegagalan, memiliki keinginan untuk membuat dampak pengurangan yang sebesar mungkin terhadap penyebab dari kemiskinan;

⁶³ ActionAid, "Good Practices for ActionAid Governance: The Governance Manual", (01 Desember 2014). <https://ActionAid.org/publications/2014/good-practices-ActionAid-governance-governance-manual>

- f. *Independence* – bebas dan netral dari afiliasi agama atau partai politik; serta
- g. *Humility* – kerendahan hati dalam presentasi, kepemimpinan dan perilaku ActionAid serta mengakui bahwa ActionAid adalah bagian dari aliansi yang lebih luas dalam melawan kemiskinan.

2.3 Struktur Organisasi ActionAid

ActionAid memiliki dua tujuan utama dalam proses internasionalisasi. Tujuan pertama adalah untuk menjadi lebih efektif dan kredibel sebagai aktor kebijakan baik secara nasional maupun global.⁶⁴ Organisasi perlu membangun kapasitasnya dalam pembuatan kebijakan dan mengoordinasikan advokasi dengan lebih baik diseluruh unit negara. Tujuan kedua, organisasi non-pemerintah perlu struktur tata kelola yang akan mewujudkan nilai-nilai intinya.⁶⁵ Kedua tujuan tersebut didorong berdasarkan pendekatan ActionAid yang berbasis hak asasi manusia dengan gagasan untuk meningkatkan akuntabilitas kepada orang-orang yang bekerja dengan organisasi dan meningkatkan legitimasi di setiap negara. Sebelum memahami struktur organisasi, penting untuk membedakan apa yang disebut dengan “tata kelola” dan “manajemen”. Tata kelola merupakan proses dimana *Assembly* atau *Board* (Majelis atau Dewan) berfungsi sebagai unit untuk mengarahkan organisasi sementara manajemen adalah

⁶⁴ Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, “ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability”, *Harvard Business School*, (10 Juli 2013), hlm 5.

file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

⁶⁵ *Ibid*, Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, “ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability”, hlm. 5

proses implementasi dan menerjemahkan kebijakan tata kelola ke dalam program dan layanan.⁶⁶

Hubungan ActionAid tiap negara berbeda-beda dengan kantor pusat ActionAid di Inggris sehingga memerlukan pengembangan struktur organisasi yang lebih rasional dan bersatu untuk memungkinkan pengambilan keputusan ke tingkat negara. Berdasarkan negosiasi antara enam unit pendiri dan konsultasi dengan sejumlah besar mitra lain, struktur tata kelola baru ActionAid terdiri dari empat aktor bergabung bersama sebagai sebuah federasi, yaitu:⁶⁷

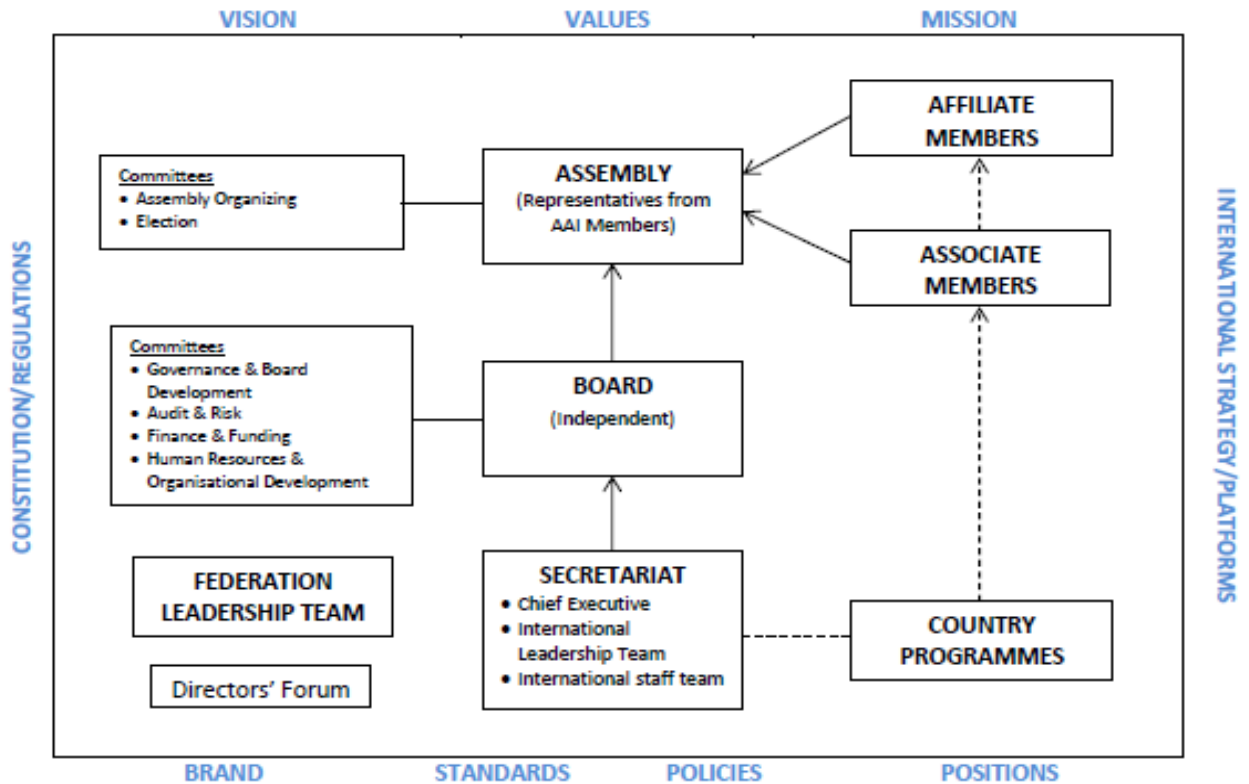
- a. *National Affiliates and Associates*
- b. *National Board and National General Assembly*
- c. *International Secretariat*
- d. *International Board*

⁶⁶ Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", Harvard Business School, (10 Juli 2013), hlm 5.

file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

⁶⁷ *Ibid*, Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability" hlm. 5

Bagan 1 Struktur Organisasi



Sumber: ActionAid, "Good Practices for ActionAid Governance: The Governance Manual", (01 Desember 2014). <https://ActionAid.org/publications/2014/good-practices-ActionAid-governance-governance-manual>

National Affiliates and Associates merupakan bagian utama dari ActionAid. Afiliasi dapat bergabung dan dimiliki oleh ActionAid dengan memiliki perwakilan resmi di dewan pengurusnya dan dengan menganut visi, misi, dan strategi organisasi. Afiliasi pendiri organisasi antara lain adalah ActionAid Brasil, ActionAid Hellas, ActionAid Irlandia, ActionAid Inggris, Action Aid USA dan ActionAid Italia.⁶⁸

⁶⁸ Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", Harvard Business School, (10 Juli 2013), hlm 5. file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

Sedangkan asosiasi merupakan organisasi-organisasi yang bergabung dengan ActionAid dengan tujuan menjadi afiliasi penuh sehingga mereka harus menjalani proses asosiasi dan pengenalan. Sebelumnya, terdapat kategori ketiga yaitu program negara, dimana sekretariat internasional secara langsung mengelola organisasi cabang-cabang ActionAid sampai mereka dapat maju ke status asosiasi.⁶⁹

National Board and National General Assembly merupakan bagian dimana setiap anggota afiliasi memiliki struktur tata kelola dua tingkat. Pertama adalah *General Assembly* dimana perwakilan bisa sampai 40 orang dan dewan nasional sampai 15 orang pilihan dari *General Assembly* itu sendiri.⁷⁰ Kedua adalah *The Board* yang bertanggungjawab atas tata kelola anggota afiliasi sesuai dengan hukum nasional dan kepatuhan atas perjanjian afiliasinya dengan ActionAid. Hal tersebut akan menempatkan komite di bidang keuangan, tata kelola, pengembangan serta penilaian dewan dan refleksi tahunan. *The Board* dan *General Assembly* juga bertujuan untuk mewakili konstituen mereka dengan memiliki setidaknya 50% anggota berada pada kelompok, komunitas, serta gerakan kaum miskin dan terkecil dimana setidaknya 50% anggotanya terdiri dari perempuan, 10% dari mitra dan mencerminkan keragaman sosial yang signifikan secara lokal.⁷¹ Jangka waktu berlangsung selama dua hingga tiga

⁶⁹ Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", Harvard Business School, (10 Juli 2013), hlm 6.

file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

⁷⁰ *Ibid*, Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", hlm. 6

⁷¹ *Ibid*, Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", hlm. 6

tahun, dengan anggota *The Board* terbatas pada dua periode dan anggota *General Assembly* untuk dua periode berturut-turut.

Sekretariat Internasional merupakan struktur manajemen ActionAid dan dijalankan oleh CEO yang ditunjuk oleh Dewan Internasional. Kantor Sekretariat Internasional terletak secara multi-lokasi dengan basis utama di Johannesburg, Afrika Selatan, dan kantor regional yang terletak di seluruh dunia yaitu di Bangkok; Thailand; Brussels, Belgia; Nairobi, Kenya; dan Rio de Janeiro, Brasil. Struktur tersebut akan memungkinkan pengaturan yang fleksibel mengenai kantor lain, yang dapat berupa kantor cabang, dan proyek yang dikelola di tingkat regional, negara atau internasional.⁷²

Pada fase pertama, selama 2003 hingga 2009, keanggotaan Dewan Internasional terdiri dari satu perwakilan dewan dari tiap anggota afiliasi serta anggota individu independen yang akan diidentifikasi berdasarkan keahlian dan bimbingan yang dapat mereka tawarkan kepada organisasi internasional. Sebagian besar anggota dewan akan memainkan peran ganda dimana mereka akan berperan untuk bertanggungjawab atas tata kelola ActionAid atau berperan sebagai anggota perwakilan dari kepentingan

⁷² Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", Harvard Business School, (10 Juli 2013), hlm 6.
file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

afiliasinya sendiri.⁷³ Keanggotaan dewan yang mewakili dapat berkisar dari 4 hingga 21 anggota yang melayani untuk masa tiga tahun dalam maksimal dua masa.⁷⁴

ActionAid secara resmi dibentuk pada bulan September 2003 dan terdaftar sebagai sebuah lembaga di Den Haag, Belanda. Dokumen resmi ActionAid menggambarkan bahwa organisasi baru mewakili transformasi budaya yang melibatkan kesatuan akan nilai-nilai inti, visi bersama, identitas, misi strategi, standar dan sistem untuk aksi kolektif melintasi batas organisasi dan nasional.⁷⁵ Namun, pada kenyataannya, transformasi organisasi hanyalah permulaan. Pada akhir 2003, ActionAid membuka arena kerjanya menjadi berbasis hak asasi manusia yang kemudian menjadi fase awal internasionalisasi pada dekade yang baru. Dengan adanya struktur organisasi yang permanen juga menunjukkan bahwa ActionAid merupakan entitas komunitas internasional yaitu NGO yang bersifat formal dan pribadi dimana organisasi terpisah secara institutional dari pemerintah namun tetap mendapat dukungan dari pemerintah sebagaimana menurut karakteristik NGO oleh Salamon dan Anheier.

2.4 Strategi ActionAid dalam Mengurangi Kemiskinan

Selama proses internasionalisasi, ActionAid telah mengembangkan metode baru dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan dimana organisasi mulai

⁷³ Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", Harvard Business School, (10 Juli 2013), hlm 6.

file:///C:/Users/HP/Downloads/2252590_1_week-9-case--1-.pdf

⁷⁴ *Ibid*, Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", hlm. 6

⁷⁵ *Ibid*, Alnoor Ebrahim dan Rachel Gordon, "ActionAid International: Globalizing Governance, Localizing Accountability", hlm. 10

melakukan pendekatan dan melibatkan langsung orang-orang dan komunitas yang bersangkutan serta memindahkan kekuatan ke negara-negara area kerja ActionAid. Proses tersebut berlanjut dengan strategi sepuluh tahun ActionAid yang baru yaitu *Action for Global Justice*.⁷⁶ Strategi tersebut dapat dibagi menjadi empat kegiatan besar, yaitu: membangun kekuatan dari bawah dengan bekerja bersama komunitas dalam jangka waktu yang panjang; menghubungkan upaya keadilan sosial, perjuangan, dan membangun kekuatan kolektif; mempengaruhi dan memindahkan kekuatan; serta pembelajaran dan penghasilan alternatif.

Dalam upayanya membangun kekuatan dari bawah, ActionAid akan bekerja sama dalam bentuk komunitas dengan jangka waktu yang panjang bersama orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan terkucilkan untuk memperkuat kesadaran individu maupun kolektif terhadap hak yang mereka miliki dan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.⁷⁷ Untuk memahami penyebab terjadinya kemiskinan dan ketidakadilan dari akarnya, ActionAid bekerja secara langsung dengan masyarakat yang bersangkutan, menghubungkan mereka dengan organisasi lokal dan aliansi dari ActionAid untuk melakukan advokasi mengenai kebijakan pemerintah dan hukum yang tidak adil agar masyarakat dapat mengklaim dan menikmati hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Sebagai NGO, ActionAid juga melakukan kampanye untuk mendukung kemampuan masyarakat dalam memindahkan dan mengubah kekuatan di

⁷⁶ ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028", hlm. 17.
https://actionaid.org/sites/default/files/strategy_2028_lr.pdf

⁷⁷ *Ibid*, ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028", hlm. 17.

berbagai tingkatan seperti menantang patriarki dan segala bentuk penindasan lainnya serta mengembangkan alternatif yang adil, berkelanjutan, dan merata.⁷⁸ Setelah proses internasionalisasi, program-program ActionAid dirancang berdasarkan pilar pendekatan hak asasi manusia, yaitu: pemberdayaan, solidaritas, kampanye, dan alternatif.⁷⁹ Berdasarkan pendekatan tersebut, ActionAid bekerja untuk memberikan layanan dan dukungan materi lainnya tanpa mengganggu integritas negara dalam kewajibannya untuk memenuhi hak asasi masyarakatnya. Anak-anak menjadi sasaran ActionAid untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan kesadaran mereka akan pemenuhan hak-hak yang mereka miliki dimana kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan dan bertahan lama dalam kehidupan anak-anak tersebut.

Strategi kegiatan selanjutnya didasari oleh isu kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan yang terletak pada tiap tingkatan baik dari rumah tangga sampai global. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ActionAid menghubungkan upaya keadilan sosial, perjuangan, dan membangun kekuatan kolektif ditingkat masyarakat, nasional dan global melalui aliansi antara komunitas, organisasi, gerakan sosial, bekerja bersama melintasi batas geografis untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan.⁸⁰ Bekerja dengan gerakan perempuan dan kampanye global juga menjadi jalan ActionAid untuk mencapai tujuannya yaitu menghadirkan kekuatan

⁷⁸ ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028", hlm. 17.

https://actionaid.org/sites/default/files/strategy_2028_lr.pdf

⁷⁹ *Ibid*, ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028", hlm. 17.

⁸⁰ *Ibid*, ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028", hlm. 17.

kolektif dan suara untuk melawan penyebab kemiskinan dan ketidakadilan yang sistemik dan transnasional.⁸¹ Suara masyarakat terutama perempuan dan penguatan terhadap kepemimpinan juga menjadi prioritas ActionAid agar mereka independen dan dapat mengatur agenda untuk memimpin perubahan.

Program kerja untuk mempengaruhi dan memindahkan kekuatan didasari oleh ketidakadilan terhadap hak-hak perempuan yang berasal dari kekuatan yang tak terlihat seperti norma-norma patriaki yang tertanam di dalamnya. Sebagian besar berupa tradisi, agama, dan pelanggaran hak-hak kelompok minoritas yang dikucilkan. Untuk menantang dan mengubah permasalahan tersebut, ActionAid bekerja dengan meningkatkan keterlibatan publik untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas dan internasionalisme dalam mengatasi patriarki, dehumanisasi, diskriminasi, rasisme, homofobia dan xenophobia yang berasal dari nilai-nilai negatif dan stereotip yang mempengaruhi hati, pikiran, dan perilaku yang dapat menghalangi pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan yang resmi.⁸² ActionAid bekerja untuk mengklaim peran negara sebagai pembawa tugas utama di semua tingkatan terutama dalam tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia secara demokratis, efektif dan transparan bersama mitra dan aliansi organisasi. Dalam tingkat regional dan internasional, ActionAid bekerja untuk mengubah kekuatan yang tersembunyi dari para elit, lembaga keuangan dan

⁸¹ ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028", hlm. 18.
https://actionaid.org/sites/default/files/strategy_2028_lr.pdf

⁸² *Ibid*, ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028", hlm. 19.

perusahaan yang dapat mempengaruhi maupun mengendalikan proses pengambilan keputusan dari semua tingkatan melalui advokasi dengan tujuan dapat mengekspos kekuatan dan peran mereka agar dapat diminta pertanggungjawabannya.

Strategi kegiatan pendekatan pembelajaran dan penghasilan alternatif didasari pada tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dari bawah, khususnya dari pengalaman masyarakat dan aliansi organisasi serta berkolaborasi dengan pusat pembelajaran untuk memperdalam dalam memahami bagaimana perubahan terjadi. Pengetahuan dan pengalaman tersebut kemudian akan menjadi dasar dari pergerakan sosial, pembuat kebijakan dan praktisi lainnya untuk mengubah suatu kebijakan dan praktik tertentu. Alternatif-alternatif yang dihasilkan akan diusulkan untuk sistem dan praktik yang telah dikritik untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja bersama ActionAid penting dalam mendefinisikan dan membangun solusi-solusi tersebut.⁸³ Berdasarkan strategi kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa ActionAid akan membangun momentum internasional untuk sosial, ekonomi dan keadilan lingkungan yang didorong oleh orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan dikucilkan.

2.6 Kehadiran dan Peran ActionAid sebagai Organisasi Non-Pemerintah di India

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat global dan kompleks karena dapat mempengaruhi stabilitas negara. Dalam kasus ini, India telah menetapkan agenda pengurangan kemiskinan menjadi prioritas selama bertahun-tahun, namun pada

⁸³ ActionAid, "Action for Global Justice: Strategy 2028", hlm. 19.
https://actionaid.org/sites/default/files/strategy_2028_lr.pdf

kenyataannya India masih menjadi rumah dari sepertiga penduduk miskin di dunia.⁸⁴ Salah satunya dikarenakan India memiliki tingkat demokrasi yang rendah sehingga walaupun terdapat berbagai macam hukum yang berlaku untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan, pengimplementasian kebijakan tersebut tidak efektif sehingga masih memungkinkan kejadian-kejadian tersebut tetap berlanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan hanya dengan satu aktor yang berperan. Sehingga, ActionAid sebagai aktor internasional hadir dengan membuka kantor cabangnya di India yang terletak di New Delhi.

Kantor cabang ActionAid India mulai beroperasi pada tahun 1972 dengan memulai upaya sederhana untuk menjangkau masyarakat miskin dan terkucilkan. Setelah tiga dekade beroperasi, ActionAid India pada akhirnya memiliki hak istimewa untuk bekerja dengan hampir lima juta kaum miskin dan terkucilkan seperti orang-orang suku, bagian perdesaan dan perkotaan, perempuan, anak-anak dan minoritas melalui kerjasama dengan lebih dari 300 organisasi lokal.⁸⁵ Orang-orang tersebut hidup dalam kondisi rentan seperti hidup dalam kondisi kelaparan kronis, pekerja migran dan pekerja terikat, anak-anak yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, orang-orang yang diperdagangkan, orang-orang dengan disabilitas,

⁸⁴ "National Sample Survey Organisation, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India", *Level and Pattern of Consumer Expenditure*, Report No. 555, (2014). Diakses pada 20 Agustus 2019. 10.1007/s11205-015-1006-6

⁸⁵ ActionAid, "Who We Are". <https://www.actionaidindia.org/who-we-are/strategic-priorities/>

serta imigran dan orang-orang terlantar. Tidak terkecuali juga dengan orang-orang yang memiliki stigma sosial dalam kehidupannya seperti seperti pekerja seks, orang-orang dengan penyakit HIV dan AIDS serta pemulung.

Selama prosesnya, fokus ActionAid India mengalami perkembangan dari fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak menjadi fokus untuk pembangunan wilayah perdesaan melalui transisi pendekatan multi-sektoral.⁸⁶ Dalam kurun waktu tersebut, pergeseran berubah menjadi pegutamaan investasi terhadap edukasi anak-anak sebagai sarana untuk mencapai dunia yang lebih baik. Perkembangan organisasi dan keadaan lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat mengharuskan ActionAid India memiliki perumusan perencanaan strategis pada lima tahun pertama. Dokumen perencanaan tersebut membuat ActionAid India memiliki mandat untuk bekerja melalui pemberdayaan serta untuk memanfaatkan sumber daya yang dapat diakses sebaik-baiknya. Kegiatan tersebut mendefinisikan prioritas terhadap area kerja organisasi di India serta mengartikulasikan perlunya kebijakan yang mempengaruhi melalui aliansi kolaboratif bersama dengan aksi tingkat mikro.⁸⁷

Setelah dokumen perencanaan strategis lima tahun ActionAid India ditinjau secara kritis oleh kantor pusat telah mendorong ActionAid India untuk merancang perencanaan strategis selanjutnya dimana perlunya bekerja terhadap hak asasi manusia dengan kebijakan yang bersifat mempengaruhi dan advokasi yang dianggap akan

⁸⁶ ActionAid, "Who We Are". <https://www.actionaidindia.org/who-we-are/strategic-priorities/>

⁸⁷ *Ibid*, ActionAid, "Who We Are".

melengkapi tindakan pada tingkat mikro.⁸⁸ Hal tersebut didasari berdasarkan pemahaman bahwa pengurangan kemiskinan mungkin dapat dilakukan melalui pemberdayaan orang-kaum miskin dan dengan memfasilitasi kebutuhan dasar untuk mencapai hak-hak yang mereka miliki. Strategi tersebut kemudian ditinjau kembali dengan perumusan dokumen *Fighting Poverty Together* yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk memberantas kemiskinan melalui pendekatan hak atas perkembangan. Setelah dokumen tersebut di proses dengan refleksi internal kolektif, ActionAid India mendapat penegasan dari kantor pusat untuk menambahkan pendekatan berbasis hak ke dalam area kerja untuk memperkuat penanganan permasalahan kesetaraan gender.

2.6.1 Mitra ActionAid India

Keberadaan mitra dalam lingkup area kerja NGO dimulai ketika pendekatan implementasi dalam suatu proyek kerja organisasi bergeser dimana organisasi lokal diidentifikasi melakukan sebagian besar pekerjaan dalam pendanaan dan mendukung organisasi.⁸⁹ Hal tersebut membuat banyak dari NGO menjadi donor dan mulai mendefinisikan hubungan mereka dengan organisasi lokal dengan istilah baru yaitu kemitraan, pendampingan, maupun pembangunan kapasitas.⁹⁰ ActionAid India sebagai

⁸⁸ ActionAid, "About Us". actionaidindiajobs.org/about-us.aspx

⁸⁹ David Lewis, "Development NGOs and the Challenge of Partnership: Changing Relations between North and South", *Social Policy & Administration*. (2010).
https://www.researchgate.net/publication/227977745_Development_NGOs_and_the_Challenge_of_Partnership_Changing_Relations_between_North_and_South

⁹⁰ *Ibid*, David Lewis, "Development NGOs and the Challenge of Partnership: Changing Relations between North and South"

NGO dengan keberadaannya yang besar dan memiliki lingkup kerja yang bersifat global membutuhkan keberadaan mitra untuk bekerjasama dalam mencapai tujuannya.

ActionAid India memiliki kantor negara yang berbasis di New Delhi dengan 12 kantor di regional dan 2 kantor lapangan yang memiliki jumlah total 162 staf dan bekerja sama dengan lebih dari 300 NGO dan masyarakat di area kerja.⁹¹ ActionAid India bermitra dan bekerja sama dengan beberapa organisasi akar, komunitas masyarakat sipil, dan beberapa *platform* untuk bekerja mengenai isu sumber daya alam, demokrasi dan pemerintahan, hak-hak anak dan perempuan, mempromosikan perdamaian serta keadilan dan sekularisme dan solidaritas di luar batas. Secara global, ActionAid India bekerja dengan organisasi lokal berbasis komunitas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman penting yang dibutuhkan serta melibatkan langsung pihak yang bermasalah seperti dalam kasus pengurangan kemiskinan adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang terkucilkan. Untuk mencapai tujuannya, ActionAid India juga mendukung 83 proyek jangka panjang termasuk dengan mitra jaringan yang bekerja sama dengan komunitas tertentu selama antara satu hingga sepuluh tahun dan 420 proyek jangka pendek yang memiliki jangka waktu selama satu tahun.⁹²

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai profil ActionAid dan bagaimana mereka bekerja sebagai NGO serta beberapa upaya mereka baik di lingkup nasional,

⁹¹ ActionAid, "Our Team and Our Allies". <https://www.ActionAidindia.org/who-we-are/people-partners/>

⁹² *Ibid*, ActionAid, "Our Team and Our Allies"

regional dan global dalam menangani kasus kemiskinan. Sesuai dengan visi misi organisasi, ActionAid sebagai NGO diharapkan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menciptakan dunia sebagai tempat yang adil untuk semua manusia, salah satunya di India yang memiliki tingkat ketidakadilan dan kemiskinan yang tinggi. Pada bab selanjutnya akan membahas mengenai kemiskinan yang di alami oleh India beserta beberapa faktor penyebab dan ketidaksetaraan gender yang terjadi.

BAB III

KEMISKINAN DI INDIA

Kemiskinan merupakan suatu fenomena global yang kompleks dan permasalahan bersama yang serius karena akan menghambat masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan juga tujuan suatu negara untuk menjadi negara maju dan berkelanjutan. India sebagai negara berkembang juga tidak luput dari fenomena kemiskinan yang sulit untuk dihindari. Permasalahan kemiskinan yang di alami oleh India juga telah menarik perhatian komunitas internasional untuk turun ikut serta dalam mengatasi isu ini. Untuk dapat memahami seberapa besar tingkat kemiskinan yang di alami oleh India lebih dalam, maka bab III ini akan membahas mengenai kondisi kemiskinan yang terjadi di India, faktor penyebab utama yang di bagi menjadi dua bagian yaitu sosial-budaya dan ekonomi, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dalam menangani isu kemiskinan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di India.

3.1 Kondisi Kemiskinan di India

India merupakan negara yang berkontribusi lebih banyak dalam kemiskinan di dunia dibanding dengan negara lainnya sehingga penanganan kaum miskin di India dapat menghasilkan dampak yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan dunia.⁹³

⁹³ Angela W. Little, "Access to Elementary Education in India: Politics, Policies and Progress", *Create Consortium for Research on Educational Access, Transitions & Equity*, (September 2010).
<http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/2548/1/PTA44.pdf>

Hal tersebut karena India merupakan negara berkembang di Asia yang menjadi rumah bagi lebih dari satu miliar orang dan menyumbang lebih dari 15% populasi dunia.⁹⁴ Pengurangan kemiskinan juga telah menjadi agenda global selama bertahun-tahun sehingga dengan mengurangi kemiskinan di India akan menjalankan agenda global tersebut.⁹⁵ India sendiri memiliki 1.2 miliar kaum miskin di dunia yang tinggal di negaranya dengan 46% anak-anak yang kekurangan gizi dan tingkat kematian balita tertinggi di dunia pada tahun 2012.⁹⁶ Walaupun tingkat kemiskinan di India telah mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir dikarenakan pengurangan kemiskinan dan pengembangan masyarakat merupakan masalah prioritas India, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tetap tinggi. India sebagai negara berkembang memiliki tingkat demokrasi yang lemah, keadaan tak berdaya, ketimpangan sosial yang tinggi, tidak memiliki kekuatan, dan marginalisasi terhadap kaum miskin. Kemampuan India sebagai negara berkembang dapat berkontribusi untuk terjadinya kemiskinan, bukan hanya dari tidak adanya pemasukan masyarakat saja. Kemiskinan juga merupakan masalah yang krusial karena dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dimana kemiskinan akan berdampak pada kehidupan yang

⁹⁴ Angela W. Little, "Access to Elementary Education in India: Politics, Policies and Progress", *Create Consortium for Research on Educational Access, Transitions & Equity*, (September 2010). <http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/2548/1/PTA44.pdf>

⁹⁵ Rajesh K. Chauhan, Sanjay K. Mohanty, S.V Subramanian, dkk, "Regional Estimates of Poverty and Inequality in India, 1993-2012", *CrossMark*, (24 Juni 2015). Diakses pada 21 Agustus 2019. DOI: 10.1007/s11205-015-1006-6

⁹⁶ David K. Carson, Ph.D. dan Aparajita Chowdhury, "The Potential Impact of Family Life Education and Lay Counselor Training on Poverty in Developing Countries: The Example of India", *International Journal of Community Development*, (2018). <https://pdfs.semanticscholar.org/2cbc/2e3c3a25620c0d977fbb5bca4dd20033b225.pdf>

kekurangan makanan bergizi, tempat tinggal tidak layak, sulit dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang tidak memadai.

Berdasarkan laporan dari Komisi Perencanaan India pada tahun 2014, jumlah keseluruhan individu yang hidup dalam kemiskinan di India mengalami penurunan dari 407.1 juta (37.2%) pada tahun 2004-2005 menjadi 354.7 juta (29.8%) pada tahun 2009-2010 dan menjadi 269.8 juta (21.9%) pada tahun 2011-2012.⁹⁷ Namun, pengurangan tersebut menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi baik antara masyarakat maupun negara bagian. Penurunan kemiskinan terjadi lebih cepat di daerah perkotaan dibanding dengan pedesaan dimana pada tingkat pedesaan menurun dari 50.2% menjadi 25.4% dan pada perkotaan menurun dari 31.9% menjadi 13.7%.⁹⁸ Hal tersebut hampir dari 30% kalangan pedesaan di India hidup dengan kemiskinan.⁹⁹ Sedangkan untuk negara bagian banyak ditemukan terutama di wilayah utara seperti Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Bengal Barat, Rajasthan, Madhya Pradesh, dan Uttarakhand.¹⁰⁰ Kemiskinan akan terus menjadi permasalahan yang berkembang yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti norma, nilai dan etos. India merupakan negara dengan kebudayaan yang beragam sehingga perubahan faktor

⁹⁷ David K. Carson, Ph.D. dan Aparajita Chowdhury, "The Potential Impact of Family Life Education and Lay Counselor Training on Poverty in Developing Countries: The Example of India", *International Journal of Community Development*, (2018). Hlm. 7
<https://pdfs.semanticscholar.org/2cbc/2e3c3a25620c0d977fbb5bca4dd20033b225.pdf>

⁹⁸ Rajesh Chauhan, Sanjay Mohanty, S V Subramanian, dkk, "Regional Estimates of Poverty and Inequality in India, 1993-2012", *Social Indicators Research*, (Juli 2016). 10.1007/s11205-015-1006-6

⁹⁹ *Loc. Cit*, David K. Carson, Ph.D. dan Aparajita Chowdhury, "The Potential Impact of Family Life Education and Lay Counselor Training on Poverty in Developing Countries: The Example of India"

¹⁰⁰ *Loc. Cit*, David K. Carson, Ph.D. dan Aparajita Chowdhury, "The Potential Impact of Family Life Education and Lay Counselor Training on Poverty in Developing Countries: The Example of India"

tersebut dapat berubah dengan cepat dikarenakan lingkungan yang multi-budaya, multi-bahasa, multi-agama serta multi-politik dan agama.

Dalam beberapa dekade terakhir, India telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan melalui fokus kebijakan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi. Namun, dampak lain dari penerapan kebijakan tersebut adalah munculnya ketimpangan ekonomi dan sosial yang meningkat dari waktu ke waktu dalam lintas batas negara bagian. Untuk dapat memantau atau tujuan praktis lainnya, penting bagi suatu negara untuk memiliki perkiraan data mengenai tingkat kemiskinan yang terjadi di negaranya. Untuk memudahkan pengawasan, India sendiri mendokumentasikan tingkat kemiskinan dan serta mengeksplorasi dan mendefinisikan faktor-faktor penentu untuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dokumentasi perkiraan tingkat kemiskinan di India mendefinisikan bahwa kaum miskin adalah individu atau rumah tangga dengan total pengeluaran per kapita riilnya dibawah garis kemiskinan.¹⁰¹ Komisi Perencanaan India juga membuat dokumentasi perkiraan tingkat kemiskinan melalui sistem survei pengeluaran rumah tangga yang diasumsikan oleh India sebagai salah satu cara yang cukup baik untuk dijadikan objek sebagai bentuk dari perkiraan kemiskinan.¹⁰² Seperti yang sudah di jelaskan di atas, tingkat kemiskinan yang tinggi di India bukan semata-mata hanya karena banyaknya penduduk atau kenyataam

¹⁰¹ Angus Deaton dan Alessandro Tarozzi, "Prices and Poverty in India", *Research Program in Development Studies*. <http://public.econ.duke.edu/~taroz/DeatonTarozzi.pdf>

¹⁰² Rajesh Chauhan, Sanjay Mohanty, S V Subramanian, dkk, "Regional Estimates of Poverty and Inequality in India, 1993-2012", *Social Indicators Research*, (Juli 2016). 10.1007/s11205-015-1006-6

bahwa India adalah negara berkembang. Untuk memahami lebih dalam kenapa tingkat kemiskinan yang tinggi bisa terjadi di India, penulis akan memaparkan faktor penyebab dilihat dari kondisi sosial-budaya dan ekonomi India.

3.2 Faktor Penyebab Kemiskinan di India

Kemiskinan di India memiliki kaitan yang erat dengan ketidaksetaraan gender, kemampuan menulis dan membaca, kepemilikan tanah, status pekerjaan dan kasta. Sehingga, individu yang memiliki risiko hidup dalam kemiskinan lebih tinggi dari pada rata-rata adalah perempuan pedesaan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, anggota suku atau kasta yang berada dibawah, orang yang hanya bergantung pada pendapatan upah dan orang yang tidak memiliki tanah.

3.2.1 Faktor Sosial-Budaya

India memiliki struktur sosial unik yang berdasarkan dari gabungan budaya, ras, dan agama yang beragam. Beberapa kelompok agama yang dapat ditemukan di India merupakan agama besar dunia seperti Hindu, Muslim, dan Kristen. Hal tersebut menyebabkan keragaman yang mencolok antara berbagai komunitas baik dalam sikap dan kelakuan yang akan mempengaruhi gaya hidup, adat istiadat, perkawinan, dsb. Keragaman juga terjadi dalam gaya hidup antara pemukiman pedesaan dan perkotaan, kehidupan masyarakat, perilaku budaya dan sosial serta dalam institusi.¹⁰³ Terdapat

¹⁰³ Reshma Elizabeth Thomas, "Gender Inequality in Modern India – Scenario and Solutions", *Journal of Humanities and Social Science*, (Agustus 2013).
<https://pdfs.semanticscholar.org/7542/86ee10b5224d7064d4dd4dd97563ff748547.pdf>

lima faktor sosial-budaya yang mempengaruhi kemiskinan di India, yaitu pendidikan, sistem kasta, sistem keluarga bersama, kustom sosial dan pertumbuhan hutang.¹⁰⁴

Pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dari dua arah, yaitu membuat kondisi kemiskinan menurun atau meningkat. Hal tersebut karena kemampuan individu sangat berpengaruh untuk menempati posisi kehidupan mereka. Kapasitas penghasilan yang didapat berdasarkan tingkat pendidikan yang telah mereka dapatkan akan berbeda satu sama lainnya.¹⁰⁵ Orang-orang yang buta huruf atau yang tidak berpendidikan tinggal dalam kondisi kemiskinan dan orang-orang yang berpendidikan dengan baik memungkinkan mereka untuk menemukan peluang kerja yang lebih baik. Berdasarkan sensus terakhir, 10% rumah tangga di India tidak memiliki satu orang pun dalam anggota keluarga yang melek huruf.¹⁰⁶ Rata-rata nasional juga menunjukkan tingkat buta huruf dalam keluarga masyarakat berkasta dan suku yang lebih buruk dengan masing-masing 13% dan 18%.¹⁰⁷ Orang-orang tersebut hidup dalam kemiskinan dikarenakan investasi yang buruk dalam mereka sendiri serta kekurangan dana untuk investasi modal manusia.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India", *Research Gate*, (Maret 2018).
https://www.researchgate.net/publication/323794744_Causes_of_Poverty_in_India/link/5aab2d410f7e9b8826712d6b/download

¹⁰⁵ *Ibid*, Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India".

¹⁰⁶ Veronica Frisncho dan Kala Krishna, "Affirmative Action in Higher Education in India: Targeting, Catch Up, and Mismatch", *Springer Science+Business Media Dordrecht*, (24 Juli 2015). DOI: 10.1007/s10734-015-9927-1

¹⁰⁷ *Ibid*, Veronica Frisncho dan Kala Krishna, "Affirmative Action in Higher Education in India: Targeting, Catch Up, and Mismatch".

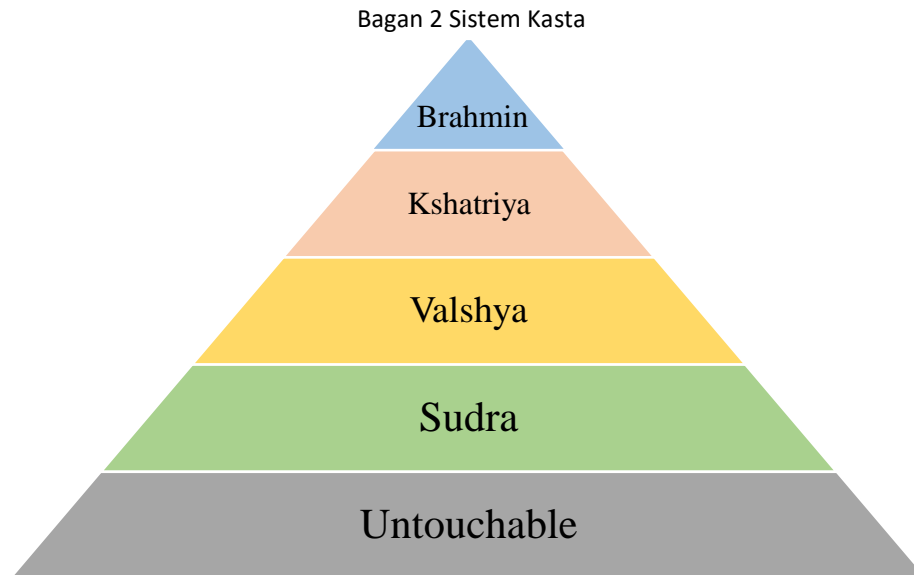
¹⁰⁸ *Loc. Cit*, Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India"

Sistem kasta di India merupakan salah satu faktor terbesar dari penyebab kemiskinan pedesaan yang terjadi di negara tersebut. Subordinasi orang-orang dengan kasta rendah dengan orang-orang kasta tinggi telah menyebabkan kemiskinan di India menetap. Sistem kasta di beberapa daerah masih sangat kental dan kaku sehingga tidak memungkinkan orang dengan kasta rendah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.¹⁰⁹ Sistem kasta pada dasarnya adalah cara membagi orang-orang ke dalam kelas sosial yang berbeda dan dimulai dengan Brahmana (guru dan imam) di tingkat atas, Kshatriya (raja dan prajurit), Vaishya (pedagang, pengrajin, petani dan saudagar), dan di tingkat terakhir adalah Shudra (pekerja yang tidak terampil atau buruh).¹¹⁰ Pada bagian terdapat di tingkat paling akhir adalah *untouchable* atau tidak tersentuh yang dikenal juga sebagai Harijan atau Dalit, dimana golongan tersebut berada di luar sistem kasta yang berarti memiliki posisi yang sangat tidak terhormat.¹¹¹ Pengelompokan kasta tersebut dibentuk berdasarkan Kitab Suci Hindu yang disebut Bhagavad Gita.

¹⁰⁹ Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India", *Research Gate*, (Maret 2018).
https://www.researchgate.net/publication/323794744_Causes_of_Poverty_in_India/link/5aab2d410f7e9b8826712d6b/download

¹¹⁰ *Ibid*, Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India".

¹¹¹ Jasmine Rao, "The Caste System: Effects on Poverty in India, Nepal and Sri Lanka", *Global Majority E-Journal*, (Desember 2010). http://www.bangladeshstudies.org/files/Global_Majority_e_Journal_1-2.pdf#page=41



Sumber: Jasmine Rao, "The Caste System: Effects on Poverty in India, Nepal and Sri Lanka", Global Majority E-Journal, (Desember 2010).
http://www.bangladeshstudies.org/files/Global_Majority_e_Journal_1-2.pdf#page=41

Awalnya, sistem ini dibentuk untuk mempromosikan kerja sama masyarakat yang harmonis, tetapi pada akhirnya, melalui korupsi, sistem ini menjadi prasangka dan penuh diskriminasi seperti saat ini.¹¹² Sistem kasta di India juga secara tidak langsung memaksa beberapa komunitas yang memiliki status kasta rendah untuk hidup didalam kemiskinan. Terdapat sekitar 180 juta sampai 220 juta orang yang memiliki status kasta terendah di India yang dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.¹¹³ Banyak dari mereka yang dilarang untuk memiliki pekerjaan karena status mereka sebagai Dalit. Terdapat 40 juta Dalit yang melakukan kerja paksa karena mereka harus

¹¹² Jasmine Rao, "The Caste System: Effects on Poverty in India, Nepal and Sri Lanka", Global Majority E-Journal, (Desember 2010). http://www.bangladeshstudies.org/files/Global_Majority_e_Journal_1-2.pdf#page=41

¹¹³ *Ibid*, Jasmine Rao, "The Caste System: Effects on Poverty in India, Nepal and Sri Lanka".

membayar hutang nenek moyang mereka.¹¹⁴ Orang-orang tersebut hidup dalam kepercayaan untuk selalu bekerja sepanjang hari dan berharap seseorang akan menggunakan jasa mereka dimana dalam kasus tersebut jarang terjadi mengingat kasta yang tinggi sering menolak untuk berhubungan dengan kasta di bawah. Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem kasta merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam memperburuk kemiskinan di India.

Sistem keluarga bersama adalah sistem keluarga dimana ketika dua atau lebih keluarga inti tinggal di bawah satu atap bersama kakek, nenek, bibi, paman, sepupu, dsb.¹¹⁵ Beberapa anggota keluarga dapat mengambil keuntungan yang tidak semestinya mereka dapatkan dengan bergantung pada pendapatan orang lain yang tinggal bersama dengan mereka. Hal tersebut menyebabkan mereka menjadi pengangguran dan pemalas yang tidak memiliki produktivitas dalam kehidupannya. Dengan sikap tersebut hanya akan ada sedikit dari anggota mereka yang berpenghasilan untuk menghidupi jumlah anggota keluarga yang besar sehingga akan berujung pada kemiskinan.

Selanjutnya adalah kebiasaan sosial yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan dimana mereka menghabiskan sejumlah besar dari pendapatan dan tabungan mereka

¹¹⁴ Jasmine Rao, "The Caste System: Effects on Poverty in India, Nepal and Sri Lanka", *Global Majority E-Journal*, (Desember 2010). http://www.bangladeshstudies.org/files/Global_Majority_e_Journal_1-2.pdf#page=41

¹¹⁵ Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India", *Research Gate*, (Maret 2018). https://www.researchgate.net/publication/323794744_Causes_of_Poverty_in_India/link/5aab2d410f7e9b8826712d6b/download

untuk kebiasaan mereka dalam membuat kebijakan dan bersosialisasi seperti kebiasaan adat-istiadat dalam pernikahan, kelahiran, dan kematian yang menyebabkan mereka kehabisan tabungannya dan menderita dari hutang dan kemiskinan.¹¹⁶ Terakhir adalah meningkatnya hutang. Pada sektor pedesaan, sebagian besar masyarakat pedesaan bergantung pada pinjaman dari pemilik tanah dan peminjaman uang bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Pemberi pinjaman menerapkan sistem bunga yang sangat tinggi dan membeli tanah yang digadaikan untuk mengeksploitasi orang-orang yang meminjam uang tersebut apabila mereka tidak membayar sesuai dengan waktu tenggang. Orang-kaum miskin yang berhutang yang tidak dapat membebaskan diri mereka dari pemberi pinjaman akan berhutang lagi ke pemberi pinjaman lainnya dan akan terus begitu hingga pada akhirnya mereka terus hidup dalam kemiskinan selama beberapa generasi karena jebakan hutang.¹¹⁷

3.2.2 Faktor Ekonomi

Ekonomi juga menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya kemiskinan di India. Penyebab tersebut terbagi dalam lima faktor ekonomi yaitu produktivitas pertanian yang rendah, distribusi tanah dan aset lainnya yang tidak merata, penurunan dalam industri desa, imobilitas tenaga kerja dan kurangnya kesempatan kerja.¹¹⁸ Pertama, produktivitas pertanian yang rendah. Terdapat hubungan antara pendapatan

¹¹⁶ Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India", *Research Gate*, (Maret 2018).
https://www.researchgate.net/publication/323794744_Causes_of_Poverty_in_India/link/5aab2d410f7e9b8826712d6b/download

¹¹⁷ *Ibid*, Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India".

¹¹⁸ *Ibid*, Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India".

riil dan kemiskinan dimana peningkatan pendapatan riil akan mengarah pada pengurangan kemiskinan. Pada sektor pertanian, bahkan sampai saat ini, teknik budidaya tradisional masih digunakan oleh para petani sehingga menyebabkan tingkat produktivitas yang rendah dan karenanya mengakibatkan kemiskinan yang berkepanjangan.¹¹⁹

Tanah dan bentuk aset pribadi lainnya merupakan sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan. Namun, sampai saat ini pendistribusian tanah dan aset lainnya tidak merata kepada semua kalangan dan komunitas masyarakat India. Pengukuran bijaksana akan pendistribusian kepemilikan tanah dan aset hanya berada di beberapa tangan petani, oleh karena itu petani lainnya menderita dan hidup dalam kemiskinan sampai batas tertentu. Selanjutnya, adanya penurunan industri desa yang disebabkan oleh industrialisasi, munculnya industri-industri baru dan pembangunan pabrik di daerah pedesaan.¹²⁰ Kegiatan tersebut menyebabkan industri-industri desa kalah saing dengan industri-industri besar baik dalam perbandingan akan kualitas maupun produktivitas. Akibatnya, industri-industri desa tersebut ditutup dan orang-orang yang bekerja di industri desa tersebut antara menjadi pengangguran atau bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik yang sedang dibuat dengan upah yang kurang dan kerjaan yang tidak produktif menyebabkan mereka hidup dalam kondisi kemiskinan.

¹¹⁹ Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India", *Research Gate*, (Maret 2018).
https://www.researchgate.net/publication/323794744_Causes_of_Poverty_in_India/link/5aab2d410f7e9b8826712d6b/download

¹²⁰ *Ibid*, Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India".

Selanjutnya adalah adanya imobilitas tenaga kerja dimana para tenaga kerja tersebut tidak ingin meninggalkan rumah mereka dan pergi ke tempat lain untuk mencari kesempatan kerja yang lebih baik lagi dan lebih memilih untuk menerima kondisi mereka sebagaimana adanya.¹²¹ Terakhir adalah kurangnya kesempatan kerja. Tidak memiliki pekerjaan merupakan salah satu langkah yang besar untuk terjun ke dalam kemiskinan, sehingga dengan kurangnya kesempatan-kesempatan kerja tersebut, banyak dari mereka adalah seorang pengangguran, pekerja dengan upah kecil, petani kecil dan buruh tani yang tidak memiliki tanah.¹²²

3.3 Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan di India

Berdasarkan kemiskinan yang dihadapi oleh India, sangatlah penting untuk memiliki serangkaian kebijakan untuk kaum miskin dan program-program dengan tujuan mencapai pengurangan dalam kemiskinan. Untuk mengatasi penyebab faktor kemiskinan dari sosial-budaya, penulis akan memaparkan usaha pemerintah India melalui perubahan sistem pendidikan dan sistem kasta. Sedangkan untuk mengatasi penyebab faktor kemiskinan dari ekonomi, sejak kemerdekaan, pemerintah India memiliki dua pendekatan utama, yang pertama berdasarkan antisipasi yang mempengaruhi keseluruhan pertumbuhan pedesaan yang akan menyebar ke semua kalangan masyarakat dimana pengurangan kemiskinan akan tercapai beserta

¹²¹ Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India", *Research Gate*, (Maret 2018).
https://www.researchgate.net/publication/323794744_Causes_of_Poverty_in_India/link/5aab2d410f7e9b8826712d6b/download

¹²² *Ibid*, Radhika Kapur, "Causes of Poverty in India".

peningkatan perkembangan ekonomi.¹²³ Kedua, adalah kebutuhan dari penerapan program-program spesifik anti-kemiskinan.¹²⁴ Untuk memahami upaya pemerintah India dalam menangani pengurangan kemiskinan di India, penulis akan menjelaskan pada sub bab di bawah ini.

3.3.1 Upaya Menangani Kemiskinan dari Faktor Penyebab Sosial-Budaya

Dalam upayanya menangani kemiskinan melalui pendidikan, Pemerintah India memiliki rencana lima tahun untuk melakukan ekspansi di semua tingkat pendidikan. Seperti yang sudah di jelaskan di atas, sistem pendidikan India secara keseluruhan dilanda masalah kualitas, akses dan kesetaraan, serta perubahan. India juga memiliki standar pendidikan yang rendah. Sekolah-sekolah maupun universitas di India tidak memiliki tempat yang cukup untuk mengatasi permintaan masyarakat yang ingin bersekolah yang terus meningkat. Berdasarkan situasi tersebut, rencana lima tahun pemerintah berupaya untuk mengubah sistem pendidikan dari setiap aspek yaitu dalam pendanaan, kepemimpinan dan manajemen, jaminan kualitas, akuntabilitas, hubungan dengan industri, kolaborasi internasional, serta sistem cara penelitian dan pengajaran dilakukan.¹²⁵ Untuk dapat menjalankan rencana tersebut, India akan membutuhkan 800 universitas dan lebih dari 40.000 perguruan tinggi untuk menyediakan 14 juta tempat

¹²³ World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty", *A World Bank Country Study*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/232941468756917265/pdf/multi-page.pdf>

¹²⁴ *Ibid*, World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty".

¹²⁵ British Council, "Understanding India: The Future of Higher Education and Opportunities for International Cooperation", *British Council*, (Februari 2014).

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/understanding_india.pdf

tambahan yang sudah direncanakan.¹²⁶ Apabila perubahan ini berhasil, luas dan dalamnya perubahan sistem pendidikan akan bersifat transformasional.

Namun, dalam rencana lima tahun ini, alokasi anggaran dari pusat untuk negara-negara bagian di India terlalu lambat dan dianggap telah menahan kemajuan dalam pendidikan.¹²⁷ Anggaran pendidikan dapat terendap selama bertahun-tahun di parlemen. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki mandat yang kuat untuk mengendalikan pendidikan di tingkat negara bagian dan mekanisme untuk memastikan bahwa negara-negara bagian mengikuti keputusan pusat tidak sepenuhnya efektif.¹²⁸ Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan untuk menyerahkan kekuatan pengambilan keputusan kepada negara-negara bagian mengenai kebijakan pendidikan. Namun, kemampuan dan tekad politik tiap negara bagian bervariasi sehingga tidak semua dapat mencapai tingkat pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.¹²⁹ Keadaan tersebut juga yang menjadikan peran NGO dalam menangani kemiskinan diperlukan.

Upaya pemerintah selanjutnya dalam mengatasi sistem kasta yang menjadi faktor penyebab kemiskinan adalah melalui sistem reservasi untuk kasta golongan

¹²⁶ British Council, "Understanding India: The Future of Higher Education and Opportunities for International Cooperation", *British Council*, (Februari 2014).

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/understanding_india.pdf

¹²⁷ *Ibid*, British Council, "Understanding India: The Future of Higher Education and Opportunities for International Cooperation".

¹²⁸ *Ibid*, British Council, "Understanding India: The Future of Higher Education and Opportunities for International Cooperation".

¹²⁹ *Ibid*, British Council, "Understanding India: The Future of Higher Education and Opportunities for International Cooperation".

terendah. Sistem tersebut bekerja dimana sejumlah kursi disediakan untuk kasta golongan sosial dan ekonomi terendah di tempat-tempat berpendidikan tinggi dan sebagai pekerja pemerintah dengan tujuan untuk menyeimbangkan stratifikasi sosial prasangka tersebut.¹³⁰ Namun, kebijakan tersebut menyebabkan lebih banyak bencana daripada kemajuan. Beberapa kontra datang dari masyarakat golongan atas yang merasa bahwa sistem ini tidak bermanfaat dan memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi anggota kelas bawah baik secara sosial maupun ekonomi.¹³¹ Selain itu, sistem ini banyak digunakan secara online dan kondisi India yang kurang akan infrastruktur, tingkat proliferasi teknologi yang rendah, dan rendahnya populasi pelanggan yang memahami internet dan teknologi menjadi kendala utama dan sebagai alasan kenapa kebijakan ini kurang efektif.¹³² Ketidakefektivan penerapan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah menjadi salah satu alasan peran NGO dalam memerangi kemiskinan di India penting.

3.3.2 Upaya Perkembangan Ekonomi

Secara umum, perkembangan ekonomi yang signifikan akan berkontribusi secara besar dalam proses pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data dari *World Health Organizations (WHO)*, diambil dari survei rumah tangga selama empat puluh

¹³⁰ Akрати Saxena, Jaspal Singh Saini, Yayati Gupta, dkk, "Social Network Analysis of the Caste-Based Reservation System in India", Department of Computer Science and Engineering Indian Institute of Technology, (8 Desember 2018). <https://arxiv.org/pdf/1512.03184.pdf>

¹³¹ *Ibid*, Akрати Saxena, Jaspal Singh Saini, Yayati Gupta, dkk, "Social Network Analysis of the Caste-Based Reservation System in India".

¹³² Arpita Khare dan Meenakshi handa, "Customers' Quality Perceptions Towards Online Railway Reservation Services in India: An Exploratory Study", *International Journal of Services and Operations Management*, (2011). DOI: 10.1504/ijksom.2011.041243

tahun, perkembangan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan 80% dari rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan.¹³³ Strategi kebijakan India terhadap perkembangan ekonomi terbagi menjadi dua fokus. Pertama, berfokus pada modal industrialisasi yang intensif di balik hambatan tarif yang tinggi, yang memberi keuntungan yang sangat kecil untuk jumlah penduduk miskin yang banyak.¹³⁴ Pekerjaan yang disediakan membutuhkan keterampilan individu yang tinggi yang tidak banyak dimiliki oleh kaum miskin. Kedua, berfokus kepada investasi di bidang pertanian. Fokus tersebut meningkatkan standar hidup rata-rata di bagian pedesaan India, tetapi juga menimbulkan efek ketidaksetaraan, dimana teknologi revolusi hijau yang dianggap memberikan keuntungan sistematis terhadap pemilik lahan sebagian besar hanya dapat diakses oleh orang kaya.¹³⁵

Kebijakan yang dibuat oleh India dalam menangani permasalahan kemiskinan yang terjadi dapat berjalan dengan efektif apabila kondisi dan aset negara memadai. Penelitian yang dilakukan WHO membuktikan bahwa penerapan kebijakan tersebut dalam beberapa negara yang memiliki aset yang memadai seperti infrastruktur dan upaya pengembangan modal manusia dapat mengurangi kemiskinan dengan cepat. Namun, negara bagian di India tidak ada yang secara efektif dapat menggabungkan kedua kebijakan tersebut untuk mendorong pertumbuhan dan mengembangkan sumber

¹³³ World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty", *A World Bank Country Study*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/232941468756917265/pdf/multi-page.pdf>

¹³⁴ *Ibid*, World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty".

¹³⁵ *Ibid*, World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty".

daya manusia serta infrastruktur dalam bentuk fisik.¹³⁶ Studi juga menunjukkan bahwa jika ada negara yang melakukannya, akan mencapai pengurangan kemiskinan yang cepat, sebanding dengan kemajuan yang dibuat oleh Asia Timur.¹³⁷ Dengan memperbaiki infrastruktur dan investasi kepada sumber daya manusia seperti memenuhi kebutuhan dasar dalam kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak akan meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka untuk mendapatkan hidup yang sejahtera dan mengurangi kemiskinan. Namun, India belum menemukan keseimbangan dari hal-hal tersebut.¹³⁸

3.3.3 Upaya Program-Program anti-Kemiskinan

Strategi anti-kemiskinan yang dimiliki oleh India berisi berbagai program anti-kemiskinan yang telah berada dalam agenda India selama beberapa dekade. Program-program mengeluarkan anggaran yang meningkat dari 5.4% menjadi 7.7%.¹³⁹ Kebanyakan dari hasil evaluasi pemerintah India setuju bahwa program-program tersebut tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Salah satu program yang dianggap efektif adalah *Integrated Child Development Services* (ICDS), program umum perkembangan gizi untuk anak berusia 0-6 tahun dan ibu yang menyusui.¹⁴⁰ Namun, tiap orang memiliki kondisi yang berbeda sehingga perlu penargetan lebih lanjut, tetapi

¹³⁶ World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty", *A World Bank Country Study*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/232941468756917265/pdf/multi-page.pdf>

¹³⁷ *Ibid*, World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty".

¹³⁸ *Ibid*, World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty".

¹³⁹ *Ibid*, World Bank, "India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty".

¹⁴⁰ C.A.K Yesudian, "Poverty Alleviation Programmes in India: A Social Audit", *Indian Journal Medical and Research*, (Oktober 2007).

<https://pdfs.semanticscholar.org/1533/2f6fdf07fc9cdee35c7e2ddb0510a104a7ce.pdf>

dengan tujuan universalisasi cepat program ini akan mengurangi tingkat keefektifitasannya. Pekerjaan umum dianggap lebih efektif dimana hal tersebut secara signifikan meingkatkan standar hidup sejumlah besar masyarakat yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem dengan dana yang relatif murah. Program tersebut yaitu *Maharashtra Employment Guarantee* (MEG). Penyebab ketidakefektivan program-program anti-kemiskinan di India berdasarkan studi dari WHO adalah masalah pada sistemik, kekurangan dana untuk program yang efektif, administrasi yang kompleks dengan biaya yang lebih tinggi dari manfaat yang dihasilkan, tujuan beberapa program yang tidak jelas sehingga mengurangi kualitas dan akuntabilitas, dan pemantauan yang tidak memadai berdampak pada perusakan tujuan program.

3.4 Ketidaksetaraan Gender di India

Ketidaksetaraan gender di India bersifat kompleks dan beragam karena fenomena tersebut berada pada setiap bidang seperti pendidikan, peluang kerja, pendapatan, kesehatan, budaya, sosial, ekonomi, dan seterusnya. India berada di peringkat 132 dari 187 negara pada indeks ketidaksetaraan gender dimana hanya 29% perempuan di atas usia 15 tahun yang bekerja, dibandingkan dengan 80.7% laki-laki, dan hanya 10.9% dari anggota parlemen adalah perempuan.¹⁴¹ Terlebih lagi, hanya 26.6% perempuan di atas usia 25 tahun yang menerima pendidikan menengah,

¹⁴¹ Reshma Elizabeth Thomas, "Gender Inequality in Modern India – Scenario and Solutions", *Journal of Humanities and Social Science*, (Agustus 2013).
<https://pdfs.semanticscholar.org/7542/86ee10b5224d7064d4dd4dd97563ff748547.pdf>

dibandingkan dengan 50.4% laki-laki.¹⁴² India telah mengalami ketidaksetaraan gender sekian lamanya dikarenakan kondisi sosial-ekonomi dan praktik keagamaan yang menghasilkan kesenjangan yang tinggi antara status perempuan dan laki-laki di masyarakat. Dampak dari permasalahan ini akan berpengaruh terhadap pengklaiman hak asasi seperti kesulitan dalam mengakses kontrol sumber daya, ekonomi dan politik yang akan menjadi hambatan dalam pembangunan berkelanjutan.

Persepsi umum perempuan di India adalah bahwa status mereka selalu berada dibawah laki-laki. Kebanyakan pandangan masih melihat bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak dan tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan pekerjaan tinggi seperti di bidang politik. Pekerjaan rumah tangga direndahkan sehingga sebagian besar berpusat di sektor-sektor ekonomi perempuan yang tidak produktif dan gaji rendah. Pada masa India kuno, perempuan dijunjung tinggi dan dianggap sebagai makhluk berharga dan harus dirawat dengan hati-hati.¹⁴³ Namun, seiring berjalannya waktu praktik poligami memperburuk status perempuan dan selalu diturunkan. Di banyak bagian di India, perempuan dianggap tidak memiliki kompeten dalam berkontribusi di bidang ekonomi, grafik kejahatan terhadap perempuan meningkat dengan cepat, kondisi sebagai janda di India sangat memprihatinkan, pekerjaan rumah tangga di rendahkan, kekerasan dalam rumah

¹⁴² Reshma Elizabeth Thomas, "Gender Inequality in Modern India – Scenario and Solutions", *Journal of Humanities and Social Science*, (Agustus 2013).

<https://pdfs.semanticscholar.org/7542/86ee10b5224d7064d4dd4dd97563ff748547.pdf>

¹⁴³ *Ibid*, Reshma Elizabeth Thomas, "Gender Inequality in Modern India – Scenario and Solutions".

tangga, pemerkosaan, eksploitasi seksual, penganiayaan dan pelecehan seksual di tempat kerja menjadi permasalahan bersama yang perlu diselesaikan.

Kejadian-kejadian tersebut terjadi berdasarkan pola pikir yang terbentuk dari interpretasi populer mitologi hindu yang memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana perempuan harus bersikap seperti menjadi ibu rumah tangga yang taat dan baik. Budaya India yang kontemporer mencerminkan hubungan kuat dengan sejarah kuno dimana masa lalu India memberikan wawasan tentang bagaimana status perempuan India di masyarakat pada saat ini.¹⁴⁴ Beberapa tulisan kuno yang disebut Rigveda berasal dari sekitar 1.500-1.000 SM memberikan bukti tentang status perempuan di India.¹⁴⁵ Ditambah lagi, temuan-temuan arkeologis, patung dan artistik juga mengungkapkan sifat kehidupan perempuan pada masa India kuno.¹⁴⁶ Dalam Ramayana, Ram berperan sebagai model untuk laki-laki dan Sita sebagai model untuk perempuan dimana hal tersebut juga berperan dalam melangsungkan seksisme dan kekerasan terhadap perempuan India sampai saat ini.¹⁴⁷ Dalam pandangan Hindu,

¹⁴⁴ Meena Razvi dan Gene L. Roth, "Socio-Economic Development and Gender Inequality in India", *Northern Illinois University*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED492144.pdf>

¹⁴⁵ *Ibid*, Meena Razvi dan Gene L. Roth, Socio-Economic Development and Gender Inequality in India".

¹⁴⁶ *Ibid*, Meena Razvi dan Gene L. Roth, Socio-Economic Development and Gender Inequality in India".

¹⁴⁷ Reshma Elizabeth Thomas, "Gender Inequality in Modern India – Scenario and Solutions", *Journal of Humanities and Social Science*, (Agustus 2013).
<https://pdfs.semanticscholar.org/7542/86ee10b5224d7064d4dd4dd97563ff748547.pdf>

perempuan tidak diizinkan untuk mandiri sehingga beberapa menjadikan pandangan tersebut untuk membenarkan tindakan akan kekerasan terhadap perempuan.¹⁴⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah di paparkan di atas menjadikan alasan-alasan kenapa India sebagai negara berkembang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Walaupun pemerintah India telah melakukan berbagai macam upaya terkait dalam menangani isu kemiskinan, pada kenyataannya kemiskinan merupakan isu yang kompleks sehingga sulit untuk hanya di atasi oleh satu aktor saja, dalam hal ini negara. Hal tersebut menjadi salah satu alasan ActionAid sebagai aktor lain dalam komunitas internasional turut ikut serta dalam menangani isu kemiskinan di India. Sehingga, berdasarkan data dan informasi dari bab II dan bab III, maka bab selanjutnya akan membahas mengenai upaya-upaya ActionAid sebagai NGO dalam membantu mengurangi kasus kemiskinan di India.

¹⁴⁸ Reshma Elizabeth Thomas, "Gender Inequality in Modern India – Scenario and Solutions", *Journal of Humanities and Social Science*, (Agustus 2013).
<https://pdfs.semanticscholar.org/7542/86ee10b5224d7064d4dd4dd97563ff748547.pdf>

BAB IV

UPAYA ACTIONAID DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI INDIA MELALUI KESETARAAN GENDER

Keberadaan NGO dalam proses menangani permasalahan kemiskinan yang terjadi di India menjadi hal yang krusial mengingat adanya perkembangan isu dan aktor dalam lingkup hubungan internasional. Terlebih lagi, fungsi NGO juga menjadi penting untuk membantu negara berkembang dengan kondisi yang kurang stabil dan kebijakan yang kurang efektif dalam menghadapi isu yang kompleks, dalam kasus ini adalah pengurangan kemiskinan. ActionAid sebagai NGO dalam hubungan internasional memiliki upaya-upaya dalam mengurangi kemiskinan di India. Berdasarkan upaya yang dilakukan ActionAid, pembagian bab ini disusun berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan ActionAid dalam mengurangi kemiskinan di India.

4.1 Menyediakan dan Menyalurkan Sumber Daya

Salah satu fungsi NGO yang dilakukan oleh ActionAid dalam upayanya melakukan pengurangan kemiskinan di India adalah sebagai implementer. Fungsi ini berkaitan dengan mobilisasi sumber daya kepada orang-orang yang membutuhkan baik dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, penyuluhan, hak asasi manusia dan bantuan darurat baik yang disebabkan oleh manusia maupun bencana alam. Situasi darurat dan bencana memiliki dampak krisis terhadap masyarakat rentan seperti orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seperti orang tua, orang-orang cacat, perempuan

dan anak-anak. Masyarakat rentan tersebut menjadi target utama ActionAid dalam respon darurat. Bentuk respon darurat yang diberikan oleh ActionAid berupa mobilisasi sumber daya seperti makanan, tempat tinggal, bantuan medis, kebersihan dan barang-barang non-makanan seperti peralatan sanitasi untuk perempuan.¹⁴⁹ ActionAid juga berfokus untuk mengatur kamp kesehatan, ruang aman untuk anak-anak dan perempuan, dan memberikan perawatan psikososial. Prinsip-prinsip panduan ActionAid dalam bekerja di situasi darurat diikuti berdasarkan *ActionAid's Human-Rights based Approach* (HRBA) yang memiliki delapan prinsip:¹⁵⁰

- a. Menempatkan badan aktif terkait orang yang hidup dalam kemiskinan dan kemudian membangun kesadaran akan hak mereka.
- b. Menganalisis dan melawan kekuatan yang tidak setara.
- c. Memajukan hak-hak perempuan.
- d. Membangun kemitraan.
- e. Menjadi akuntabel dan transparan.
- f. Memantau, mengevaluasi dan membuktikan dampak yang dihasilkan.
- g. Menghubungkan pekerjaan lintas-level untuk perubahan struktural.
- h. Berorientasi pada solusi dan mempromosikan alternatif yang kredibel dan berkelanjutan.

¹⁴⁹ ActionAid, "When Disaster Strikes: Emergency Response", *actionaid*, 2017-2020.
<https://www.actionaidindia.org/emergency/emergency-response/>

¹⁵⁰ *Ibid*, ActionAid, "When Disaster Strikes: Emergency Response".

Berdasarkan hal tersebut, ActionAid berfungsi sebagai implementer dengan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berjalan sesuai dengan visi misi mereka. Pengaplikasian teori dan prinsip tersebut dapat dilihat pada respon darurat ActionAid terhadap banjir yang terjadi di bagian India timur laut, Assam, pada tahun 2017. Bencana alam banjir tersebut berdampak pada lebih dari 3.3 juta orang di 3186 desa melintasi 25 distrik.¹⁵¹ Perkiraan orang yang meninggal akibat banjir sampai 180 orang dengan ribuan rumah yang hancur beserta 182.343 hektar lahan pertanian.¹⁵² Merespon dari bencana ini, ActionAid melakukan dua tahap intervensi pada tanggal 30 Agustus 2017 bersama dengan beberapa mitra lokal dan dapat mencapai lebih dari 2200 keluarga yang terkena dampak dari bencana.¹⁵³ Intervensi pertama berupa pendistribusian makanan matang dan mentah termasuk beras, garam dan minyak goreng (600 keluarga), menyediakan terpal untuk membangun tempat penampungan sementara (600 keluarga), memasok kebutuhan barang-barang untuk kebersihan (300 keluarga), memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan (300 keluarga), dan memberikan perlengkapan bertahan hidup untuk perempuan dan kelompok yang membutuhkan (600 keluarga).¹⁵⁴

¹⁵¹ ActionAid, "Humanitarian Response to Flood Affected Families in Northeast 2017", *actionaid*, 2017. <https://www.actionaidindia.org/emergency/humanitarian-response-to-flood-affected-families-in-northeast-2017/>

¹⁵² *Ibid*, ActionAid, "Humanitarian Response to Flood Affected Families in Northeast 2017".

¹⁵³ *Ibid*, ActionAid, "Humanitarian Response to Flood Affected Families in Northeast 2017".

¹⁵⁴ ActionAid, "Humanitarian Response to Flood Affected Families in Northeast 2017", *actionaid*, 2017. <https://www.actionaidindia.org/emergency/humanitarian-response-to-flood-affected-families-in-northeast-2017/>

Tahap kedua intervensi ActionAid berupa promosi rehabilitasi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terkena dampak. Beberapa upaya tersebut berupa memulai program pemberian uang tunai untuk bekerja untuk memastikan bahwa keluarga yang terkena dampak memiliki akses ke sumber pendapatan yang stabil, memberikan dukungan mata pencaharian kepada keluarga, terutama petani, dalam bentuk benih dan persediaan penting lainnya, serta mendukung rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dengan bantuan keuangan.¹⁵⁵ Respon dan intervensi ActionAid terhadap situasi darurat merupakan salah satu bentuk upaya mereka sebagai implementer. Kejadian ini juga didukung oleh argumen dari literatur Michel Craplet yang berjudul *The Role of Non-Governmental Organizations* yang mengatakan bahwa fungsi dan sifat NGO yang fleksibel dalam melakukan intervensi di bidang informasi, pelatihan, advokasi, dan bantuan dimana mereka dapat dengan mudah memposisikan diri dalam kerangka waktu yang diperlukan untuk menjalani prosedur administrasi yang dianggap memberatkan.

Terlebih lagi, banjir yang terjadi di Assam pada tahun 2017 menghasilkan respon pemerintah yang memberikan bantuan berupa mengorganisir operasi pencarian dan penyelamatan yang melibatkan pasukan Angkatan Darat India dan Pasukan Bantuan Bencana Nasional dan Negara yang berhasil menyelamatkan 3000 jiwa, membangun kamp bantuan di 304 lokasi berbeda yang dapat menampung hingga 138.648 orang,

¹⁵⁵ Prabin Kalita dan Naresh Mitra, "Worst Flood in 29 Years Hits Assam", *The Times of India*, (14 Agustus 2017). <https://timesofindia.indiatimes.com/india/worst-flood-in-29-years-hits-assam/articleshow/60050865.cms>

mendistribusikan makanan mentah darurat kepada masyarakat dan menyediakan barang-barang non-makanan seperti tablet penjernih air, terpal, lilin, obat nyamuk, dll, yang telah membantu mengatasi beberapa kerentanan dalam masyarakat, namun pembagian didistribusikan secara tidak merata dengan jumlah yang tidak mencukupi.¹⁵⁶ Kejadian tersebut menjadi salah satu implikasi ActionAid dalam upayanya sebagai implementer untuk memobilisasikan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat secara adil dan merata.

Dalam menangani implikasi tersebut, ActionAid sebagai NGO perlu memiliki rencana mobilisasi sumber daya yang berencana, memantau dan mengembangkan inisiatif mobilisasi sumber daya.¹⁵⁷ Untuk melaksanakan hal tersebut, penting untuk berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan seperti pemangku kepentingan diantaranya adalah pemerintah India, mitra ActionAid dan masyarakat yang terkena bencana serta verifikasi terhadap strategi pendapatan. Dalam kasus banjir yang terjadi di Assam, ActionAid bekerja sama dengan mitra organisasi lokal yaitu *North-East Affected Area Development Society* (NEADS) dan *The North East Research & Social Work Networking* (NERSWN) yang telah berperan secara aktif secara keseluruhan dalam respon tanggap darurat yang berhasil menjangkau lebih dari 2200 keluarga di

¹⁵⁶ ActionAid, "Humanitarian Response to Flood Affected Families in Northeast 2017", *actionaid*, 2017. <https://www.actionaidindia.org/emergency/humanitarian-response-to-flood-affected-families-in-northeast-2017/>

¹⁵⁷ Mymunah Harir, "Challenges Faced By NGOs in Mobilization of Funds for Operation: The Case of United Nations Environmental Programme", *United States International University Africa*, (2015). <https://pdfs.semanticscholar.org/b925/0f9095b2e48db202f5c247f5be2e54f1da4d.pdf>

wilayah yang terkena dampak banjir.¹⁵⁸ Hal tersebut juga menjadikan ActionAid mendapatkan kepercayaan dari pemerintah India untuk memobilisasi sumber daya secara merata yang kemudian juga akan menjadi mitra dari ActionAid India.

Respon situasi darurat ActionAid dalam kasus banjir Assam pada tahun 2017 juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di India. Bencana alam yang parah dapat mengancam untuk mengembalikan kemajuan dalam melawan kemiskinan selama beberapa dekade sebelumnya.¹⁵⁹ Menurut UNDP, banjir menyebabkan masalah di negara-negara berkembang yang memiliki Produk Domestik Bruto per kapita yang lemah, seperti Bangladesh dan India. Dalam kasus ini, banjir yang parah memiliki konsekuensi dalam kemanusiaan dan juga ekonomi dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan akan mendapat konsekuensi yang parah dan akan terus berada didalam lingkungan kaum miskin. Hal tersebut menyebabkan kaum miskin yang terkena dampak dari bencana alam membutuhkan perlindungan lebih baik dari sisi sosial maupun finansial. Orang yang hidup dalam kemiskinan dan terkucilkan lebih banyak terkena dampak karena mata pencaharian mereka yang bergantung pada aset yang lebih sedikit, konsumsi mereka yang lebih dekat ke tingkat subsisten, ketidakmampuan

¹⁵⁸ ActionAid, "Humanitarian Response to Flood Affected Families in Northeast 2017", *actionaid*, 2017. <https://www.actionaidindia.org/emergency/humanitarian-response-to-flood-affected-families-in-northeast-2017/>

¹⁵⁹ Larry Elliott, "Natural Disasters Push 26m Into Poverty Each Year, Says World Bank", *The Guardian*, 14 November 2016. <https://www.theguardian.com/business/2016/nov/14/natural-disasters-poverty-world-bank-climate-change>

untuk mengandalkan tabungan dalam menghadapi dampak dan waktu yang dibutuhkan untuk rekonstruksi lebih lama.¹⁶⁰

4.2 Mengadakan Sejumlah Program untuk Kaum miskin

Selain dari berfungsi sebagai implementer, ActionAid juga berfungsi sebagai katalis dalam salah satu bentuk upayanya untuk mengurangi kemiskinan di India. Fungsi ActionAid sebagai katalis mengandung upaya mereka dalam bentuk program-program yang ditujukan untuk orang-kaum miskin. Sebelum memasuki analisa upaya ActionAid sebagai katalis, penting untuk mengetahui dinamika yang telah di alami oleh ActionAid untuk menjalankan sebuah program beserta solusinya dimana mereka dapat menjalankan program-programnya hingga saat ini. Pada masa-masa internasionalisasi, dinamika ActionAid untuk menjalankan program-program adalah kebutuhan mereka akan informasi sistematis untuk menginformasikan kesesuaian keputusan mereka dan keefektivitasan dalam penggalangan dana. Tuntutan akan sistem akuntabilitas baru juga terus meningkat.¹⁶¹ Dalam menghadapi dinamika tersebut, ActionAid membentuk sistem *ActionAid's Accountability, Learning and Planning System (ALPS)* pada tahun 2000. Sistem ini merinci proses untuk penilaian, perumusan strategi, tinjauan program, serta refleksi reguler di seluruh program, departemen dan kemitraan organisasi.¹⁶²

¹⁶⁰ Larry Elliott, "Natural Disasters Push 26m Into Poverty Each Year, Says World Bank", *The Guardian*, 14 November 2016. <https://www.theguardian.com/business/2016/nov/14/natural-disasters-poverty-world-bank-climate-change>

¹⁶¹ Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged", *Development in Practice*, (2016). <https://www.jstor.org/stable/4029512>

¹⁶² *Ibid*, Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged".

Sistem ini di anggap berbeda karena berupaya meningkatkan akuntabilitas kepada kaum miskin dan mitra, sambil mempertahankan akuntabilitas tradisional kepada sponsor dan donor.¹⁶³

ALPS juga memiliki prinsip bahwa masyarakat miskin adalah pemangku kepentingan utama ActionAid. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa pandangan, aspirasi, dan evaluasi masyarakat miskin akan menjadi kekuatan pendorong utama dalam perancangan, penilaian dan pekerjaan ActionAid.¹⁶⁴ Sistem ini membuka saluran formal untuk arahan yang berasal dari masyarakat miskin serta manajemen dimana untuk melakukan hal-hal tersebut, staf ActionAid di semua tingkatan mendedikasikan waktu untuk transparansi, pembelajaran, dan negosiasi dengan masyarakat miskin dan mitra. ALPS dapat berbentuk pertemuan tahunan untuk refleksi kritis termasuk masyarakat miskin, staf, dan perwakilan pemerintah. Program-program anti-kemiskinan tersebut dapat berupa advokasi melalui gerakan sosial dan juga aktivitas belajar bersama.¹⁶⁵

Beberapa tahun setelah pengimplementasian ALPS, ActionAid mulai berubah secara dramatis ketika pemikiran tentang pembangunan berubah dimana peran ActionAid sebagai NGO adalah untuk mendukung hak-hak kaum miskin yang tidak

¹⁶³ Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged", *Development in Practice*, (2016).
<https://www.jstor.org/stable/4029512>

¹⁶⁴ *Ibid*, Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged".

¹⁶⁵ *Ibid*, Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged".

hanya untuk layanan tetapi juga untuk pengambilan keputusan dalam pembangunan dan pemerintahan.¹⁶⁶ Gagasan tersebut menunjukkan bahwa istilah dikembangkan menjadi berpengaruh, bertanggung jawab, memiliki sumber daya dan menganjurkan bahwa kaum miskin memiliki hak untuk didengar dan ditanggapi. Hal tersebut mengakibatkan kemiskinan akan berkurang jika kaum miskin dan terkucilkan menemukan cara untuk memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan yang mempengaruhi hidup mereka.¹⁶⁷

Melalui sistem tersebut, dalam tanggung jawabnya kepada konstituensi, ActionAid berusaha menyelaraskan prinsip-prinsipnya dengan praktiknya yang dapat dikatakan sebagai strategi yang efektif. Secara kombinasi, pembelajaran dan keefektifan memiliki peluang yang adil untuk menghadapi kekuatan dan konflik yang menghambat.¹⁶⁸ Dengan demikian, ALPS dapat memudahkan para staf dan mitra ActionAid untuk bekerja secara menyeluruh dan menyelesaikan lebih cepat tahap-tahap ketidakselarasan yang akan mereka hadapi.¹⁶⁹ ALPS merupakan salah satu sistem landasan yang digunakan oleh ActionAid untuk menjalankan program-programnya saat ini baik dalam bentuk pemberdayaan, kampanye, maupun advokasi. Selanjutnya,

¹⁶⁶ Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged", *Development in Practice*, (2016).

<https://www.jstor.org/stable/4029512>

¹⁶⁷ *Ibid*, Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged".

¹⁶⁸ *Ibid*, Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged"

¹⁶⁹ *Ibid*, Patta Scott-Villiers, "The Struggle for Organisational Change: How the ActionAid Accountability, Learning and Planning System Emerged".

untuk memudahkan pembaca dalam memahami upaya ActionAid sebagai katalis, penulis membagi upaya kedalam tiga bagian, yaitu pemberdayaan, kampanye, dan advokasi.

4.2.1 Mengadakan Program Pemberdayaan

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab kedua, ActionAid memiliki program-program pemberdayaan yang diarahkan kepada individu atau suatu kelompok dalam komunitas lokal, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Dalam programnya *Empowering Women Farmers of Pithoragarh*, ActionAid bersama mitra lokal *Association for Rural Planning and Action* (ARPAN) dan Oracle telah bekerja untuk memberdayakan petani perempuan dari lingkungan masyarakat yang terkucilkan di Pithoragarh dengan tujuan tidak hanya untuk membentuk kolektif perempuan dan memperkuatnya, tetapi juga untuk membangun kapasitas perempuan untuk menghadapi berbagai macam masalah. Program ini telah berhasil membentuk 16 kolektif perempuan pertanian di 15 desa dengan total keanggotaan lebih dari 800 petani wanita pada tahun 2019.¹⁷⁰ Program ini bekerja dengan pelatihan dan kunjungan rutin yang menghasilkan para petani perempuan berorientasi pada teknik pertanian berbiaya rendah, pertanian berkelanjutan yang tahan iklim, teknik bertani sayuran, bank benih

¹⁷⁰ ActionAid, "Empowering Women Farmers of Pithoragarh", *actionaid*. (Kamis, 30 Oktober 2019). <https://www.actionaidindia.org/empowering-women-farmers-of-pithoragarh/>

dan pemasaran terhadap hasil tani.¹⁷¹ Para perempuan pertanian ini juga telah dikaitkan dengan beberapa skema dan hak pemerintah.¹⁷²

Program tersebut merupakan salah satu upaya dalam rencana kegiatan besar 2028 yang dilakukan oleh ActionAid untuk mengurangi kemiskinan di India yaitu membangun kekuatan dari bawah untuk perubahan. Program tersebut sesuai dengan fungsi ActionAid sebagai katalis dimana mereka memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memfasilitasi dan berkontribusi untuk mengubah atau meningkatkan cara berpikir serta tindakan yang lebih baik untuk mempromosikan transformasi sosial. Hal tersebut sejalan dengan argumen dari Bratton yang mengatakan bahwa NGO dapat meningkatkan masyarakat sipil melalui pendekatan partisipatif mereka, dengan asumsi model linier dimana NGO menyediakan saluran untuk mewakili kelompok yang dikucilkan dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem politik.¹⁷³ Sifat inovatif dan eksperimental mereka menjadi pusat dalam keefektivitasan program kerja, karena memungkinkan mereka untuk menemukan cara baru dalam menjangkau kelompok yang dikucilkan.¹⁷⁴ Program tersebut juga berkelanjutan karena ActionAid bekerja sama dalam bentuk komunitas dengan jangka waktu yang panjang bersama orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan terkucilkan untuk memperkuat kesadaran

¹⁷¹ ActionAid, "Empowering Women Farmers of Pithoragarh", *actionaid*. (Kamis, 30 Oktober 2019). <https://www.actionaidindia.org/empowering-women-farmers-of-pithoragarh/>

¹⁷² *Ibid*, Action Aid, "Empowering Women Farmers of Pithoragarh".

¹⁷³ Nicola Banks, David Hulme dan Michael Edwards, "NGOs, States, and Donors Revisited: Still Too Close for Comfort?", *Elsevier World Development*, Februari 2015. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.09.028>

¹⁷⁴ *Ibid*, Nicola Banks, David Hulme dan Michael Edwards, "NGOs, States, and Donors Revisited: Still Too Close for Comfort?"

individu maupun kolektif terhadap hak yang mereka miliki dan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, bukan hanya sekedar pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan munculnya kepemimpinan perempuan di desa-desa yang dengan tegas memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas.¹⁷⁵

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab tiga, ketidaksetaraan gender di India merupakan isu yang hangat mengingat hanya 29% perempuan di atas usia 15 tahun yang bekerja, dibandingkan dengan 80.7% laki-laki, dan hanya 10.9% dari anggota parlemen adalah perempuan.¹⁷⁶ Terlebih lagi, hanya 26.6% perempuan di atas usia 25 tahun yang menerima pendidikan menengah, dibandingkan dengan 50.4% laki-laki.¹⁷⁷ India memiliki persepsi umum terhadap perempuan dimana status mereka selalu berada dibawah laki-laki. Padahal, pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan juga penting untuk mengurangi kemiskinan dengan salah satu caranya adalah meningkatkan pengembangan usaha sendiri. Berdasarkan fakta tersebut dan visi misi yang dimiliki oleh ActionAid, NGO tersebut kemudian membuka kantor cabangnya di India yang terletak di New Delhi dan mulai bekerja dengan membentuk program-program khusus untuk memberdayakan wanita.

¹⁷⁵ Action Aid, "Empowering Women Farmers of Pithoragarh", *actionaid*. (Kamis, 30 Oktober 2019). <https://www.actionaidindia.org/empowering-women-farmers-of-pithoragarh/>

¹⁷⁶ Reshma Elizabeth Thomas, "Gender Inequality in Modern India – Scenario and Solutions", *Journal of Humanities and Social Science*, (Agustus 2013).

¹⁷⁷ *Ibid*, Reshma Elizabeth Thomas, "Gender Inequality in Modern India – Scenario and Solutions"

4.2.2 Mengadakan Kampanye

Upaya ActionAid selanjutnya dalam mengurangi kemiskinan di India adalah melalui kampanye. Upaya ini salah satunya di dasari oleh kegiatan besar yang dimiliki oleh ActionAid yaitu untuk menghubungkan upaya keadilan sosial, perjuangan, dan membangun kekuatan kolektif ditingkat masyarakat, nasional dan global melalui aliansi antara komunitas, organisasi masyarakat, gerakan sosial, bekerja bersama melintasi batas geografis untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Salah satu kampanye ActionAid adalah *The 16 Days of Activism against Gender-Based Violence* yang bersifat internasional dan diadakan tahunan yang dimulai pada *International Day for the Elimination of Violence against Women* (25 November) dan berlangsung hingga *Human Rights Day* (10 Desember).¹⁷⁸ Setiap tahun, selama 16 hari tersebut, ActionAid beserta mitra dan kelompok lainnya mengadakan kampanye di seluruh negara dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan kekerasan berbasis gender.

Di negara bagian India, Uttarakhand, dampak dari kampanye yang dilaksanakan oleh ActionAid ini meningkatkan konsultasi tingkat negara terhadap isu-isu mengenai *single-women* dan munculnya pendiskusan mengenai perumusan kebijakan terhadap perempuan untuk negara yang diselenggarakan pada 9 Desember

¹⁷⁸ ActionAid, "16 Days of Activism against Gender-Based Violence – a report on the campaign in 2019", *actionaid*, (Kamis, 19 Desember 2019). <https://www.actionaidindia.org/story/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-a-report-on-the-campaign-in-2019/>

2019 bersama dengan Komisi Perempuan Negara.¹⁷⁹ Hampir 120 orang, termasuk pejabat pemerintah, departemen kepolisian dan perwakilan masyarakat sipil ikut berpartisipasi dalam konsultasi ini yang menghasilkan kesepakatan bahwa perlunya perumusan akan kebijakan perempuan untuk Uttarakhand dan diskusi bahwa masalah yang dihadapi oleh *single-women* akan membantu dalam perumusan ketentuan kebijakan untuk *single-women*.¹⁸⁰ Kekerasan terhadap perempuan dapat menjebak mereka kedalam kemiskinan. Lingkungan dengan kekerasan terhadap perempuan akan mengarah terhadap kesulitan akan akses pendidikan dan tingkat produktifitas yang buruk, sehingga mereka akan kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kurang memiliki keterampilan. Berdasarkan data dari UNESCO, hampir seperempat perempuan usia 15-24 atau 116 juta di negara berkembang tidak dapat menyelesaikan sekolah dasar.¹⁸¹ Sehingga, penting untuk melaksanakan kampanye akan kekerasan terhadap perempuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal.

Bekerja dengan gerakan perempuan dan kampanye global juga menjadi jalan ActionAid untuk mencapai tujuannya yaitu menghadirkan kekuatan kolektif dan suara untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan yang transnasional. Melalui kampanye ini juga, ActionAid dapat mendukung kemampuan masyarakat dalam memindahkan

¹⁷⁹ ActionAid, "16 Days of Activism against Gender-Based Violence – a report on the campaign in 2019", *actionaid*, (Kamis, 19 Desember 2019). <https://www.actionaidindia.org/story/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-a-report-on-the-campaign-in-2019/>

¹⁸⁰ *Ibid*, ActionAid, "16 Days of Activism against Gender-Based Violence – a report on the campaign in 2019".

¹⁸¹ UNESCO, "Girls' Education – The Facts", *Education for All Global Monitoring Report*, Oktober 2013. en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/girls-factsheet-en.pdf

dan mengubah kekuatan dalam berbagai tingkatan seperti menantang patriarki dan segala bentuk penindasan lainnya serta mengembangkan alternatif yang adil, berkelanjutan, dan merata. Kampanye yang dilakukan oleh ActionAid juga berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, terutama perempuan, dengan pemerintah agar suara mereka dapat didengar. Kegiatan tersebut sesuai dengan fungsi NGO dimana mereka menggunakan metode komunikasi interpersonal dan mempelajari titik masuk yang tepat sehingga mereka mendapat kepercayaan dari komunitas yang bersangkutan.¹⁸² Fungsi ini juga penting bagi pemerintah karena NGO dapat berkomunikasi dengan tingkat pembuat kebijakan pemerintah serta memberikan informasi mengenai kehidupan, kemampuan, sikap dan karakteristik budaya masyarakat lokal.¹⁸³

4.2.3 Melakukan Proses Advokasi

Advokasi juga merupakan salah satu upaya ActionAid untuk mewujudkan visi dalam mengurangi kemiskinan di India. Salah satu bentuk advokasi yang dilakukan ActionAid adalah melalui program *World Day for Decent Work* yang diselenggarakan pada 7 Oktober 2019. Hampir 300 perempuan dari Perumbakkam yang terletak di negara bagian Tamil Nadu, India berkumpul bersama dan mengangkat isu-isu yang mereka hadapi di dunia kerja.¹⁸⁴ Program ini dikelola oleh ActionAid bersama mitra

¹⁸² Cousins William, "Non-Governmental Initiatives", *The Urban Poor and Infrastructure Services in Asia and the Pacific*. <https://www.gdrc.org/ngo/ngo-roles.html>

¹⁸³ *Ibid*, Cousins William, "Non-Governmental Initiatives".

¹⁸⁴ ActionAid, "Decent Work for Women Dependent on the Informal Economy", *actionaid*, (Kamis, 28 November 2019). <https://www.actionaidindia.org/story/decent-work-for-women-dependent-on-the-informal-economy/>

lokal *Tamil Nadu Domestic Workers Welfare Trust* (TNDWWT) dan partisipasi dari beberapa perwakilan konstituensi. Selama program ini, perempuan dari sektor informal berbicara tentang kebutuhan mereka akan pengakuan sebagai tenaga kerja, pengaturan mengenai upah dan kondisi kerja dan hak-hak mereka untuk perlindungan sosial dan martabat.¹⁸⁵ Beberapa suara juga menyerukan perbaikan akan tantangan yang berdampak buruk terhadap partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja yang menghambat akses mereka untuk bekerja dengan layak, termasuk kesehatan, transportasi dan keselamatan.¹⁸⁶ Selain itu, anggota kolektif domestik lokal juga menuntut untuk memperbaiki kebijakan Rupees 75 per jam sebagai upah minimum, selain undang-undang nasional untuk pekerja domestik.¹⁸⁷ Upaya tersebut juga menjadi contoh dari asumsi konstruktivisme sosial dimana perilaku individu dan aktor lainnya dibentuk oleh nilai-nilai, keyakinan bersama, aturan yang dibentuk secara sosial dan praktik budaya salah satunya untuk berinteraksi dan mengubah makna norma.

Upaya advokasi salah satunya di dasari oleh kegiatan besar ActionAid dalam mengurangi kemiskinan di India yaitu kegiatan pendekatan pembelajaran dan penghasilan alternatif. Pada program advokasi tersebut, pekerja perempuan dapat menyuarkan kebutuhan mereka berdasarkan pembelajaran dari pengalaman masyarakat yang kemudian menjadi dasar dari pergerakan sosial, pembuat kebijakan

¹⁸⁵ ActionAid, "Decent Work for Women Dependent on the Informal Economy", *actionaid*, (Kamis, 28 November 2019). <https://www.actionaidindia.org/story/decent-work-for-women-dependent-on-the-informal-economy/>

¹⁸⁶ *Ibid*, ActionAid, "Decent Work for Women Dependent on the Informal Economy".

¹⁸⁷ *Ibid*, ActionAid, "Decent Work for Women Dependent on the Informal Economy".

dan praktisi lainnya untuk mengubah suatu kebijakan dan praktik tertentu. Program advokasi tersebut juga menunjukkan bahwa ActionAid membangun momentum internasional untuk sosial, ekonomi dan keadilan lingkungan yang didorong oleh orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan dikucilkan. Berdasarkan argumen dari Fellanze Pula dan Justina Shiroka-Pula, penting untuk adanya peran institusi internasional dalam mempromosikan dan menyuarakan perempuan dalam posisi pembentukan kebijakan serta pentingnya kebijakan intensif terhadap wirausaha perempuan.¹⁸⁸

Advokasi juga merupakan bentuk dari fungsi NGO untuk memfasilitasi komunikasi dua arah yaitu dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat. Dalam kasus program *World Day for Decent Work*, ActionAid memfasilitasi komunikasi dari masyarakat ke pemerintah dimana ActionAid berfungsi sebagai media agar suara masyarakat yang dikucilkan terdengar. Bentuk advokasi yang dilakukan oleh ActionAid juga berupa publikasian hasil penelitian dan studi kasus mengenai kelompok masyarakat miskin di India. Bentuk publikasi yang dilakukan ActionAid adalah berupa buku laporan yang muncul dari tinjauan dan refleksi proses kerja dengan pekerja domestik yang berjudul *Ensuring Decent Work and Dignity* pada tahun 2015 dengan dukungan dari Komisi Eropa untuk mengamankan hak dan mata

¹⁸⁸ Fellanze ula dan Justina Shiroka-Pula, "Economic Empowerment of Women in Kosovo and Factors that Directly Influence Women's Economic Empowerment", *Economic and Social Development: Book of Preceedings*, (10 Juni 2016). Diakses pada 28 September 2019.
<https://search.proquest.com/docview/1854280825/7D2AEB5114634641PQ/6?accountid=31495>

pencapaian berkelanjutan melalui aksi kolektif dan pendidikan untuk masyarakat yang bergantung pada ekonomi informal di India.¹⁸⁹ Dengan demikian, ActionAid berfungsi sebagai advokat bagi masyarakat miskin serta berfungsi sebagai mitra dan penasihat.

4.3 Menjalin Kerja Sama dengan Sejumlah Mitra

Selanjutnya, adalah fungsi kemitraan dalam NGO. Keberadaan mitra dalam NGO sangat penting dalam suatu program kerja karena berkontribusi besar dalam pendanaan dan dukungan untuk berjalannya program kerja tersebut. ActionAid bekerja dengan berbagai konteks dan mitra yang beragam, termasuk: NGO lokal dan internasional; gerakan sosial; jaringan; institusi akademik; pemerintah; dan sektor swasta.¹⁹⁰ Seperti penjelasan pada bab dua, ActionAid India bekerja dengan lebih dari 300 NGO dan berbagai macam komunitas yang dapat mendukung 83 program jangka panjang (antara satu sampai sepuluh tahun) termasuk mitra jaringan dan 420 program jangka pendek (hingga satu tahun).¹⁹¹ Laporan tahunan ActionAid 2015-2016 menunjukkan bahwa organisasi bekerja dengan 252 mitra aliansi, dengan 22% dipimpin oleh perempuan dan 16% dipimpin oleh minoritas, suku, dan komunitas terbelakang lainnya.¹⁹² Intervensi ActionAid India juga tersebar di 25 negara bagian dan satu wilayah persatuan, termasuk 134 distrik paling terbelakang di India, dan membantu

¹⁸⁹ ActionAid, *Ensuring Decent Work and Dignity: a Review of Engagement with Domestic Workers Across Seven States in India*, New Delhi: actionaid. 2019. <https://www.actionaidindia.org/wp-content/uploads/2019/05/Ensuring-Decent-Work-and-Dignity.pdf>

¹⁹⁰ Sharing Value Asia, "ActionAid: A Partnership Approach", *Sharing Value Asia*, 2014. <http://sharingvalue.asia/partners/action-aid/>

¹⁹¹ ActionAid, "Our Team and Our Allies". <https://www.ActionAidindia.org/who-we-are/people-partners/>

¹⁹² *Ibid*, ActionAid, "Our Team and Our Allies".

meningkatkan kualitas kehidupan lebih dari 132.000 keluarga dari komunitas yang dikucilkan seperti Dalit, suku, Muslim dan nelayan.¹⁹³

Luasnya mitra yang bekerja dengan ActionAid mencerminkan bahwa ActionAid sebagai NGO dengan kompleksitas dan keberagaman pekerjaan telah menyeluruh secara geografi, fungsi dan tingkat lokal dan internasional. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran konstruktivisme sosial yang memandang bahwa konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional adalah interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas, kepentingan, nilai-nilai dan maksud yang pada akhirnya membangun pola hubungan tertentu.¹⁹⁴ ActionAid memiliki pendekatan dengan prinsip inti yaitu bekerja dalam kemitraan. Pendekatan tersebut penting bagi ActionAid melihat banyaknya jaringan mitra yang bekerja sama dengan mereka karena gerakan yang luas dalam memerangi isu yang kompleks, dalam kasus ini adalah kemiskinan, akan dapat dicapai apabila bekerja dengan kolaboratif, baik secara lokal, nasional, maupun global. Interaksi antar subjek tersebut juga didapatkan oleh ActionAid melalui cara kerja mereka dalam mengurangi kemiskinan yaitu dengan bekerja bersama orang-orang miskin dan terkucilkan, para pendukung, mitra dan kolega. Keberagaman tersebut juga mencerminkan spektrum kemitraan yang luas dalam berbagai kolaborasi, kerja sama, produksi, aliansi dan pembangunan gerakan.¹⁹⁵ Kepercayaan ActionAid

¹⁹³ ActionAid, "Our Team and Our Allies". <https://www.ActionAidindia.org/who-we-are/people-partners/>

¹⁹⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

¹⁹⁵ Sharing Value Asia, "ActionAid: A Partnership Approach", *Sharing Value Asia*, 2014. <http://sharingvalue.asia/partners/action-aid/>

untuk bekerja secara luas dan beragam juga akan membangun gerakan yang tangguh untuk perubahan positif dan berkelanjutan bagi orang yang hidup dalam kemiskinan.

ActionAid menjalin kerja sama dengan mitra dan para pemangku kepentingan di India yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama. Namun, terdapat implikasi dalam memahami tujuan kemitraan tersebut. Sehingga, ActionAid sebagai NGO membutuhkan pengembangan dalam pemahaman kejelasan nilai yang dimiliki oleh mitra dengan skala yang besar untuk memahami tujuan dan sifat kemitraan serta pendekatan yang dilakukan ActionAid dalam praktiknya untuk bekerja sama dengan kemitraan. Menjalinkan kerja sama dengan kemitraan dapat menjadi lebih seimbang ketika mitra memperkuat dalam mengartikulasi kebutuhan dan apa yang dapat mereka tawarkan melalui dialog antar pihak yang bersangkutan.¹⁹⁶ Selain itu, salah satu implikasi ActionAid dalam menjalin kerja sama dengan kemitraan adalah transparansi dan akuntabilitas dimana hal tersebut berpusat pada pendanaan. Dengan banyaknya program kerja yang dilaksanakan dapat mengembangkan cara-cara sistematis untuk memperkuat struktur akuntabilitas NGO.¹⁹⁷ Sehingga, ActionAid menjalin kerja sama dengan beberapa kemitraan untuk menjalankan program-program kerjanya dalam mengurangi kemiskinan di India melalui kesetaraan gender.

¹⁹⁶ INTRAC, "NGOS AND PARTNERSHIP", *NGO Policy Briefing Paper*, (April 2001).

[http://www.orange.ngo/wp-](http://www.orange.ngo/wp-content/uploads/2016/09/INTRAC_policy_paper_on_NGO_partnership.pdf)

[content/uploads/2016/09/INTRAC_policy_paper_on_NGO_partnership.pdf](http://www.orange.ngo/wp-content/uploads/2016/09/INTRAC_policy_paper_on_NGO_partnership.pdf)

¹⁹⁷ *Ibid*, INTRAC, "NGOS AND PARTNERSHIP", *NGO Policy Briefing Paper*, (April 2001)

Berdasarkan fungsi NGO menurut David Lewis, fungsi dari kemitraan adalah bekerja sama untuk mendukung berjalannya suatu program seperti memberikan input spesifik, pendanaan, bersifat luas dan juga bertanggung jawab. Salah satu mitra ActionAid, Karle Infra TCS berpartisipasi dalam program *TCS World 10k Marathon* yang bertujuan untuk mendukung kampanye ActionAid “*Giving Wings to Children from Marginalized Communities*” dan juga program kerja Action bersama tunawisma dengan mendukung loka karya untuk remaja perempuan dalam “*Gender Equality, Sex and Reproductive Health*”. Selain itu, fungsi kemitraan juga adalah memiliki program yang memiliki keterkaitan antara NGO dengan masyarakat yang bersangkutan. Karle Infra TCS merupakan perusahaan yang bekerja untuk pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis India yang memiliki nilai dan tanggung jawab sosial untuk menjalin kerjasama yang baik dengan setiap komunitas global yang bersifat sosial, lingkungan, dan dampak ekonomi. Kedua subjek internasional tersebut, yaitu ActionAid dan Karle Infra TCS menjalin kerjasama karena adanya interaksi sosial dan pertukaran cara pandang termasuk nilai-nilai yang kedua belah pihak miliki seperti apa yang diasumsikan oleh konstruktivisme sosial.

Mitra ActionAid lainnya, Concentrix, mendukung program ActionAid untuk kegiatan pengembangan kemampuan. Berbagai macam sesi pelatihan kemampuan dilakukan dalam bidang seni Mehndi, merajut dan bahasa inggris. Kegiatan tersebut merupakan tindakan dari ‘*capacity building*’ yang berupaya untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan demi kehidupan yang lebih baik. Program-program

tersebut merupakan salah satu cara ActionAid untuk menunjukkan transparansi dan tanggung jawab mereka sebagai NGO dalam bekerja sama dengan mitra. Hal tersebut dilihat dari berjalannya sebuah program karena ActionAid memiliki kewajiban untuk memberikan laporan acara, laporan rutin kepada mitra sebagai penyandang dana, memberikan pembaruan dan memastikan uang yang dikeluarkan untuk masyarakat diketahui oleh mitra.¹⁹⁸

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa ActionAid telah melakukan upaya-upaya dalam mengurangi kemiskinan di India dengan meningkatkan kesetaraan gender melalui fungsinya sebagai NGO. Rangkaian program-program baik jangka panjang maupun jangka pendek telah bekerja untuk memenuhi tujuan, visi dan misi organisasi bersamaan dengan mitra-mitra ActionAid yang memiliki nilai sejalan. Beberapa program juga membantu pemerintah India secara eksplisit dalam menangani beberapa kasus yang dapat mengarah pada kemiskinan. Hal-hal tersebut juga membuktikan bahwa keberadaan NGO pada dunia hubungan internasional dewasa ini penting dan dibutuhkan mengingat mulai munculnya isu-isu kemanusiaan yang kompleks dan berkembang. Untuk bab selanjutnya merupakan bab terakhir yang akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian ini

¹⁹⁸ ActionAid, "Transparency and Accountability", *actionaid*, 2017-2020.
<https://www.actionaidindia.org/get-involved/corporate-engagement/>

